

# SINERGI



**Sinergitas Pengembangan  
Lima Destinasi Pariwisata  
*Super Prioritas***





**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH (BPIW)  
KEMENTERIAN PUPR**



**SIGAP  
MEMBANGUN NEGERI**

**Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR**  
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 11210  
Email: [humasbpiw@gmail.com](mailto:humasbpiw@gmail.com) Telp. +6221-2751 5804

## Salam Sinergi .....

Pembaca yang terhormat, Buletin Sinergi saat ini memasuki edisi yang ke-44. Edisi ke-44 ini bersamaan dengan momentum semangat awal tahun 2020. Pada awal tahun ini dalam Buletin Sinergi banyak sentuhan inovasi baru dalam rubriknya.

Kami menyadari perubahan merupakan suatu keniscayaan. Untuk itu, perubahan signifikan dalam penyajian informasi dilakukan sebagai upaya memberikan pelayanan informasi yang efektif dan optimal pada seluruh pembaca.

Pada edisi ini, Buletin Sinergi mengangkat tema besar "Pengembangan 5 KSPN Super Prioritas". Tema tersebut kemudian diuraikan secara mendalam dari berbagai perspektif para ahli, mulai dari pemerintah, asosiasi pengusaha hingga lembaga swadaya masyarakat.

Pembahasan KSPN super prioritas secara menyeluruh dilakukan, mengingat BPIW terus mematangkan substansi dan "mengawal" untuk memastikan *Integrated Tourism Masterplan* (ITMP) berjalan sebagai peta bersama dalam pengembangan KSPN super prioritas.

Kami juga berharap, perubahan besar yang terjadi dalam Buletin Sinergi ini dapat membuat pembaca tidak bosan dan memberikan sesuatu yang baru dan bermanfaat.

Salam hormat,

**Pemimpin Redaksi**

# SINERGI

BULETIN BPIW

16

**Wawancara:**

Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc  
PUPR Kawal Pembangunan Infrastruktur di Lima  
Destinasi Pariwisata Super Prioritas



**Perspektif**

Dr. Ir Djoko Hartoyo, M.Mar, Sc.  
Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas  
Harus ada Harmonisasi Antar Sektor

10

**Review:**

Mengembangkan Destinasi Pariwisata

38

**Warta BPIW:**

Penyusunan Program Terpadu  
Melalui Konsultasi Regional

41

**Info Pengembangan Wilayah:**

Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur PUPR  
dan Asian Highway Network untuk Mendukung  
KSPN Tanjung Kelayang dan KSPN Muaro Jambi

47



**Tim Penyusun**

**Pengarah:**  
Hadi Suahyono

**Penanggung Jawab:**  
Firman Hatorangan  
Napitupulu

**Penasihat**

Bobby Prabowo  
Iwan Nurwanto  
Kuswardono  
Manggas Rudy Siahaan

**Pemimpin Redaksi**  
P. Yudiantoro

**Redaktur Pelaksana**  
Shovich

**Staf Editor :**  
Hendra Djamal  
Mutri Batul Aini

**Tim Pembuat Artikel:**  
Indira Dwi Kusumatuti  
Daris Anugrah  
Tim Kontributor  
Pemberitaan

**Sekretariat:**  
Untung Priyono  
Nur Wahyu

**Diterbitkan oleh:**  
Badan Pengembangan In-  
frastruktur Wilayah (BPIW)  
Kementerian PUPR

# daftar isi

Edisi 44 | Januari - februari 2020



4

Topik Utama:

**Sinergitas Pengembangan  
Lima Destinasi Pariwisata**

*Super Prioritas*

**Design Grafis :**  
Heri Hito

Infografis, layout :  
Ajeng Ayuning Pertiwi

illustrator line art cover:  
Cut Myra

**Alamat Redaksi:**

Gedung G, BPIW Lantai 1  
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12110  
Email: [humasbpiw@gmail.com](mailto:humasbpiw@gmail.com),  
[humasbpiw@pu.go.id](mailto:humasbpiw@pu.go.id)  
Website: [bpiw.pu.go.id](http://bpiw.pu.go.id)  
No. Telp. +6221-2751 5804

Redaksi menerima tulisan/artikel/opini/foto yang berkaitan dengan bidang pengembangan infrastruktur dan keterpaduan wilayah dalam lingkup kegiatan Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat. Redaksi berhak menyunting naskah/artikel yang masuk sesuai dengan tema penerbitan dan ketersediaan jumlah halaman/rubrik.

Tulisan dapat dikirim ke email:  
[humasbpiw@gmail.com](mailto:humasbpiw@gmail.com),  
[humasbpiw@pu.go.id](mailto:humasbpiw@pu.go.id)

# SINERGITAS PENGEMBANGAN LIMA DESTINASI PARIWISATA *Super Prioritas*

Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang diandalkan untuk menambah pendapatan negara, melalui kunjungan wisatawan terutama dari mancanegara. Hal itu cukup beralasan, mengingat Indonesia kaya akan keindahan alam, budaya, dan seni, yang menarik para wisatawan untuk berkunjung ke Indonesia. Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas pun dicanangkan Pemerintah untuk dikembangkan dan diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan. Pengembangan lima kawasan pariwisata super prioritas tersebut tak bisa dilakukan hanya satu sektor saja, perlu kerja sama semua sektor untuk mengangkat pariwisata nasional.

Dengan segala keunikan budaya serta keindahan alamnya, pariwisata di tanah air menarik perhatian dunia. Hal ini tergambarkan dari data *Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI)* dari *World Economic Forum (WEF)* yang menunjukkan peringkat Indonesia meningkat pesat. Dari rangking 70 pada tahun 2013, menjadi ranking 40 pada tahun 2019. Meski peringkat Indonesia meningkat tajam, bukan berarti pengembangan pariwisata telah tuntas. Masih banyak tantangan di sektor tersebut yang harus dikejar mengingat negara tetangga seperti Thailand peringkatnya lebih baik dari Indonesia yakni peringkat 34. Negara Malaysia peringkatnya lebih baik, yakni peringkat 26.

Guna meningkatkan kunjungan wisatawan agar dapat bersaing dengan negara lain, Presiden Joko Widodo saat rapat terbatas kabinet 15 Juli 2019 lalu di Jakarta mencanangkan pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas di lima wilayah yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika-Lombok (Nusa

Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), dan Likupang (Sulawesi Utara).

Sebelum menjadi lima, pada 2017 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan pengembangan 10 Destinasi Wisata Prioritas atau yang disebut "10 Bali Baru". Kesepuluh destinasi wisata tersebut yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Tanjung Kelayang (Bangka Belitung), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika-Lombok (Nusa Tenggara Barat), Bromo- Tengger - Semeru (Jawa Timur), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Tanjung Lesung (Banten) dan Morotai (Maluku Utara).

Kemudian, dari 10 Destinasi Wisata Prioritas tersebut, pada 2019 dikerucutkan menjadi empat Destinasi Pariwisata Super Prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika. Hingga akhirnya pada 15 Juli itu, Jokowi menambah Likupang, sehingga menjadi lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas yang tengah gencar dikembangkan dengan melibatkan beberapa instansi



Danau Toba

Sumber: Istimewa

Ada enam arahan Jokowi terkait pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas.

diantaranya Kementerian Pariwisata, PUPR, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Perhubungan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Ada enam arahan Jokowi terkait pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Pertama, terkait tata ruang, ia meminta dilakukan pengaturan dan pengendalian tata ruang. Arahan Jokowi yang kedua terkait akses dan konektivitas di terminal, bandara, dan *runway* pesawat. Selain itu juga yang harus diperhatikan menurutnya adalah konektivitas jalan menuju ke tujuan wisata, dermaga dan pelabuhan-pelabuhan.

Arahan ketiga adalah fasilitas di lokasi wisata, di mana perlu dilakukan penataan pedagang kaki lima, restoran-restoran kecil, dan toilet (standar bintang empat). Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi arahan Jokowi yang keempat.

Menurutnya perlu dilakukan training/ pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM. Arahan Jokowi terkait SDM ini

juga dalam hal budaya kerja, budaya melayani, dan budaya kebersihan.

Pemasaran produk lokal menjadi arahan Presiden yang kelima. Arahan Jokowi yang keenam yakni promosi Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas tersebut secara besar-besaran secara integrasi.

Dari beberapa kali blusukan ke lima Kawasan Pariwisata Super Prioritas tersebut, 2019 lalu, orang nomor satu di Indonesia itu meminta agar pada KEK Mandalika dibangun fasilitas dasar yang layak, dan bisa selesai sesuai rencana. Selain itu Jokowi juga ingin memastikan Mandalika siap untuk menggelar MotoGP 2021.

Sedangkan untuk Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo ada lima strategi Pemerintah Pusat untuk menata kawasan tersebut. Pertama, memperluas Bandara Internasional Komodo di Labuan Bajo serta memperpanjang *runway* yang ada. Kedua, Pengelolaan bandara di Labuan Bajo akan dilelang. Pengelola bandara adalah yang memiliki jaringan pariwisata internasional sehingga yang datang ke Labuan Bajo adalah wisatawan yang bisa meningkatkan



“...mengenai pengembangan destinasi pariwisata prioritas, tiga tahun lalu sudah disampaikan akan dibangun 10 Bali baru tetapi sekarang kita baru memberi prioritas pada lokasi terlebih dahulu...”

Presiden Joko Widodo  
Jakarta 15 Juli 2019





Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI 5 Februari 2020.

Sumber: BPIW

devisa. Ketiga, menata Kawasan Puncak Waringin, akan dirapikan dan dijadikan pusat *handicraft* di Labuan Bajo. Keempat, pelabuhan untuk kontainer dipindahkan ke tempat lain. Pelabuhan Bajo hanya fokus untuk penumpang phinisi, *yacht*, dan *cruise*. Untuk fasilitas jalan akan dilebarkan. Kelima, menjadikan Labuan Bajo sebagai segmentasi premium.

Untuk pengembangan kawasan pariwisata di Ekonomi Khusus (KEK) Likupang di Kabupaten Minahasa Utara, Pemerintah Pusat memberikan dukungan penuh. Investasi berupa pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata di Sulawesi Utara.

Beberapa di antaranya ialah perluasan terminal bandara Sam Ratulangi di Manado, pelebaran jalan menuju lokasi wisata, dan pembangunan jalan tol yang akan

memudahkan wisatawan menuju lokasi.

Saat berbicara di Konsultasi Regional (Konreg) di Magelang 12 Februari lalu, Deputy Bidang Sarana dan Prasarana Ir. Kennedy Simanjuntak, MA menyatakan Pemerintah mendorong penguatan industrialisasi dan pariwisata melalui pengembangan Kawasan Industri Prioritas, beberapa diantaranya KEK Kendal, Kawasan Industri (KI) Brebes, KI Gresik, KI Madura.

Kennedy juga menyatakan Pemerintah mendorong juga penguatan Kawasan Pariwisata Super Prioritas, sehingga perlu didukung oleh pembangunan infrastruktur, misalnya pembangunan jalan akses menuju kawasan industri dan pariwisata, termasuk pengembangan Jalan Tol Jogja –Bawen dan Tol Solo –Jogja –

Pemerintah mendorong juga penguatan Kawasan Pariwisata Super Prioritas, sehingga perlu didukung oleh pembangunan infrastruktur

Program untuk Kawasan Pariwisata Danau Toba seperti pada sektor Sumber Daya Air antara lain Rehabilitasi Embung Pea Nadeak dan Pembangunan Penyediaan Air Baku Kawasan Kaldera Toba.

*New Yogyakarta International Airport (NYIA)* dalam mendukung Kawasan Pariwisata Borobudur.

### **Dukungan Infrastruktur PUPR Untuk Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas**

Sejak Presiden menyampaikan soal Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas itu tahun lalu, Kementerian PUPR telah menyiapkan dan merealisasikan pembangunan infrastruktur di kawasan tersebut. Anggaran tahun 2020 ini juga telah diprogramkan dan direalisasikan. Hal itu telah disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI 5 Februari lalu. Berikut uraian programnya :

#### **KSPN Danau Toba**

Beberapa program untuk Kawasan Pariwisata Danau Toba seperti pada sektor Sumber Daya Air antara lain Rehabilitasi Embung Pea Nadeak dan Pembangunan Penyediaan Air Baku Kawasan Kaldera Toba. Program pembangunan Jalan dan Jembatan diantaranya Pembangunan Jalan Balige *By Pass* dan Pembangunan Kantilever Medan – Berastagi.

Pada sektor Permukiman, beberapa program antara lain Penataan Kampung Ulos Hutaraja dan Huta Sialagan serta Pembangunan TPA Sidikalang.

Sedangkan program perumahan antara lain Pembangunan sarana hunian pendukung Kawasan Pariwisata Pengembangan Sarana Hunian Pendukung Kawasan Pariwisata.

#### **KSPN Borobudur**

Beberapa program untuk Kawasan Pariwisata Borobudur pada sektor Sumber Daya Air antara lain yakni, Pembangunan Prasarana Pengendali Banjir Sungai dan Anak Sungai Bogowonto Kawasan Strategis

YIA. Sedangkan untuk Jalan dan Jembatan, beberapa programnya antara lain: Rekonstruksi Jalan Keprekan – Borobudur, Jembatan Pejalan Kaki Elo, dan Jembatan Gantung Kali Progo (antara Candi Pawon dan Candi Mendut).

#### **KSPN Mandalika**

Beberapa program untuk sektor Sumber Daya Air pada KSPN Mandalika diantaranya Desain Penyediaan Air Baku Bendungan Pengga di Kab. Lombok Tengah dan Pembangunan Saluran Pengendali Banjir. Selain itu ada pembangunan Jalan dan Jembatan antara lain Pembangunan Jalan *Bypass* Bandara Internasional Lombok (BIL) – Mandalika.

Kemudian pada sektor Permukiman Kementerian PUPR memiliki beberapa program antara lain: Pengembangan Wisata 3 Gili (Gili Trawangan, Air, dan Meno) dan Peningkatan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Penggat. Perumahan juga akan dibangun di KSPN Mandalika.

Beberapa program sektor ini diantaranya Pembangunan Rumah Khusus di Kab. Sumbawa Barat dan Pembangunan Sarana Hunian Pendukung Kawasan Pariwisata.

#### **KSPN Labuan Bajo**

Kementerian PUPR juga telah menyiapkan beberapa program untuk sektor Sumber Daya Air pada tahun ini. Beberapa diantaranya adalah program Desain Pengendalian banjir Sungai Waemese dan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pengaman pantai Lohbuaya, Pulau Rinca.

Tidak hanya itu, program terkait Jalan dan Jembatan juga dilaksanakan tahun ini antara lain Peningkatan Jalan Kawasan Pariwisata Waecicu, Peningkatan

Beberapa Dukungan Infrastruktur PUPR TA 2020 untuk

**Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas**



Jalan dan Penataan Trotoar dan Drainase Jalan Sp. Pede, Soekarno Hatta Atas – Bawah, dan Perbaikan Geometrik Jalan Sp.

Menjerite – Lancang (Akses Wae Kelambu). Terkait sektor Permukiman beberapa program antara lain Penataan Kawasan Pantai Marina - Bukit Pramuka dan Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Wae Mese II

Sedangkan untuk sektor Perumahan, program pembangunan infrastruktur antara lain Pembangunan Sarana Hunian Pendukung Kawasan Pariwisata Kab. Manggarai Barat.

**Likupang (KSPN Manado – Bitung – Likupang)**

Pada sektor Sumber Daya Air, beberapa program yang disiapkan Kementerian PUPR antara lain Pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Likupang dan Pembangunan Prasarana Air Tanah untuk Air Baku di Likupang.

Pada destinasi pariwisata yang ada di Pulau Sulawesi ini, Kementerian PUPR memiliki program untuk pembangunan Jalan dan Jembatan antara lain Pembangunan Manado *Outer Ring Road* (MORR) dan Peningkatan Jalan, Penataan Trotoar, dan Pembangunan *Biking Track* di Pantai Pulisan.

Untuk sektor Permukiman beberapa program Kementerian PUPR antara lain Penataan Kawasan Pantai Malalayang dan Penataan *Ecotourism Village* Bunaken. Sedangkan program Perumahan antara lain Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya.

Bukan sekedar meningkatkan angka jumlah wisatawan, namun pengembangan Lima Kawasan Pariwisata Super Prioritas itu diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dan pada akhirnya dapat menekan jumlah pengangguran di Indonesia **(Redaksi)**

.....

*Untuk sektor Permukiman beberapa program Kementerian PUPR antara lain Penataan Kawasan Pantai Malalayang Penataan Ecotourism Village Bunaken. Sedangkan program Perumahan antara lain Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya*



## **Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas Harus ada Harmonisasi Antar Sektor**

**Dr. Ir. Djoko Hartoyo, M. Mar, Sc.**

.....  
*Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan, dan Pariwisata  
Kemenko Maritim dan Investasi*

**K**ementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Kemaritiman dan Investasi merupakan koordinator untuk tujuh Kementerian. Hal itu bukan perkara mudah. Apalagi Kemenko ini punya tugas untuk mengkoordinasikan pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Agar program tersebut dapat berjalan sesuai arahan Presiden, maka bagi Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan, dan Pariwisata Kemenko Kemaritiman dan Investasi Dr.Ir Djoko Hartoyo, M.Mar, Sc., harus ada keserasian dan harmonisasi antar berbagai sektor. Langkah apa yang dilakukan terkait Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas?. Berikut bincang-bincang lengkapnya dengan Buletin Sinergi yang telah dilakukan beberapa waktu lalu.

**Pemerintah memfokuskan pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang. Bagaimana langkah Bapak dalam mempercepat kawasan tersebut?**

Langkah percepatan pengembangan yang kita lakukan antara lain dengan pembentukan Badan Otorita Pariwisata (BOP). Saat ini Perpres pembentukan Badan Otorita Pariwisata telah ditetapkan masing-masing untuk Danau Toba, Borobudur dan Labuan Bajo. Ketiganya merupakan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Adapun dua lainnya yakni Mandalika dan Likupang merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

BOP mempunyai fungsi koordinatif yang mencakup kawasan sekitarnya, sehingga dapat menjembatani kepentingan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maupun antar Pemerintah Daerah di kawasanya, sehingga dapat bersinergi mengembangkan kepariwisataan di kawasan tersebut.

Selain itu, sesuai arahan Presiden dalam Rapat Terbatas (Ratas)

pada Juli 2019 yang lalu, yang mana salah satu arahnya adalah Peningkatan Akses dan Konektivitas terminal, bandara, runway, konektivitas jalan menuju ke tujuan wisata, dermaga dan pelabuhan. Terkait hal itu, kami mendorong diterapkannya konsep pengembangan infrastruktur konektivitas terpadu yang terintegrasi serta multi moda, sehingga akses ke Destinasi Pariwisata Super Prioritas tersebut dapat lebih mudah, nyaman dan aman (safe).

Percepatan dan *The Bottle Necking* permasalahan yang menghambat program pembangunan infrastruktur yang telah dicanangkan dan direncanakan, misalnya terkait pembangunan bandara, dan jalan tol, biasanya masalah lahan yang menjadi kendalanya. Untuk itu para pemangku kepentingan harus dapat duduk bersama dan dicarikan solusinya.

**Apakah dapat dijelaskan seperti apa progres pengembangan lima destinasi pariwisata tersebut?**

Bisa. Jadi begini. Di kawasan pariwisata Danau Toba kita permudah akses melalui udara, sejak 2017 lalu Bandara Internasional Silangit yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara telah

.....  
"Langkah percepatan pengembangan yang kita lakukan antara lain dengan pembentukan Badan Otorita Pariwisata (BOP)"

*"Di kawasan pariwisata Danau Toba kita mempermudah akses melalui udara. Sejak 2017 lalu Bandara Internasional Silangit yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara telah beroperasi dan terus dilakukan pengembangan"*

beroperasi dan terus dilakukan pengembangan seperti panjang landas pacu telah ditingkatkan dari 2.250 x 30 m menjadi 2.650 x 45 m. Kemudian dilakukan proses peningkatan terminal dari 200.000 penumpang per tahun menjadi 500.000 penumpang per tahun.

Selanjutnya dilakukan proses peningkatan apron dari kapasitas dua pesawat menjadi enam pesawat berbadan lebar. Selain bandara Silangit juga ada Bandara Sibisa yang berada di Kabupaten Toba Samosir. Di bandara ini, telah beroperasi penerbangan perintis oleh Aviastar dengan pesawat Cessna dengan kapasitas 19 penumpang yang terbang satu kali per minggu dengan rute Binaka, P.Nias – Sibisa. Peningkatan Panjang landaspacu juga dilakukan di bandara ini yakni dari 700 x 30 m menjadi 1.200 x 30 m.

Terkait akses darat ke Danau Toba juga telah dibuat Jalan tol dari Medan – Tebing Tinggi sepanjang 60 km dan Jalan Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat Panjang sepanjang 143,5 km. Jalan tol ini ditargetkan selesai tahun ini. Selanjutnya ada Jalan Lingkar Samosir Preservasi dan pelebaran jalan sepanjang 123 km. Badan Otorita Danau Toba (BODT) dan Perum DAMRI telah bekerja sama melaksanakan layanan operasional dan sosialisasi bis ukuran sedang dua unit dari Bandara Silangit menuju Pelabuhan Ajibata.

Kemudian untuk akses melalui danau, telah diselesaikan peningkatan sisi danau tiga dermaga yakni Ajibata, Tigaras, dan Simanindo. Pembangunan baru satu dermaga di Ambarita juga dilakukan. Pemerintah juga melebarkan Alur Tano Ponggol, Kabupaten Samosir. Selanjutnya telah dibangun dua Kapal Ferry Ro-ro, yaitu Kapal Motor

## Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas

### Danau Toba



#### Bandara Internasional Silangit

- Panjang landas pacu telah ditingkatkan dari 2.250 x 30 m menjadi 2.650 x 45 m.
- Proses peningkatan terminal dari 200.000 penumpang per tahun menjadi 500.000 penumpang per tahun.
- Peningkatan apron dari kapasitas dua pesawat menjadi enam pesawat berbadan lebar.



#### Bandara Sibisa

- Telah beroperasi penerbangan perintis oleh Aviastar dengan pesawat Cessna. Terbang satu kali per minggu (Rute Binaka, P.Nias – Sibisa)
- Peningkatan Panjang landaspacu juga dilakukan di bandara ini yakni dari 700 x 30 m menjadi 1.200 x 30 m.



#### Akses Darat ke Danau Toba

- Jalan tol dari Medan – Tebing Tinggi sepanjang 60 km.
- Jalan Tol Kuala Tanjung – Tebing Tinggi – Parapat Panjang sepanjang 143,5 km. (Ditargetkan selesai tahun ini)
- Jalan Lingkar Samosir Preservasi dan Pelebaran Jalan sepanjang 123 km.
- BODT dan Perum DAMRI menyiapkan dua unit bus dari Bandara Silangit menuju Pelabuhan Ajibata.



#### Akses Melalui Danau Toba

- Peningkatan sisi danau tiga dermaga yakni Ajibata, Tigaras, dan Simanindo.
- Pembangunan baru satu dermaga di Ambarita juga dilakukan.
- Pelebaran Alur Tano Ponggol, Kabupaten Samosir.
- Dibangun dua Kapal Ferry Ro-ro, yaitu Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Ihan Batak dan KMP Pora-pora



#### Untuk Mengurangi Pencemaran dan Penurunan Kualitas air Danau Toba

- Dikeluarkan Pergub 2017, Daya Tampung dan daya Dukung Danau Toba untuk Budidaya Perikanan.
- Kesepakatan Bersama :
  - Menghentikan penebangan hutan.
  - Menghentikan pembuangan limbah ke Danau Toba.
  - Menangani sampah secara komprehensif.

Penyeberangan (KMP) Ihan Batak dan KMP Pora-pora keduanya telah dioperasikan oleh PT Angkutan Sungai dan Penyeberangan (ASDP).

Dalam rangka mengurangi pencemaran dan penurunan kualitas air Danau Toba telah dikeluarkan Peraturan Gubernur 188.44/213/KPTS/2017, Daya Tampung dan daya Dukung Danau Toba untuk Budidaya Perikanan. Kemudian ada kajian World Bank yakni terkait *Water Quality* dan *Roadmap for Lake Toba* dan juga ada kajian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) terkait rekomendasi pengurangan jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) di masing-masing Kabupaten /lokasi (milik masyarakat maupun swasta).

Selain itu ada Kesepakatan Bersama para Bupati, Gubernur, Pangdam, Kapolda, Kementerian untuk KJA, menghentikan penebangan hutan, menghentikan pembuangan limbah ke Danau Toba, dan menangani sampah secara komprehensif.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pembentukan Badan Otorita Pariwisata Danau Toba. Badan Otorita Pariwisata pertama ini dibentuk Pemerintah dalam rangka percepatan pengembangan Destinasi Pariwisata.

Kawasan Otoratif Badan Otorita Danau Toba mencakup kawasan sekitar 500 Ha. Badan ini menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU) secara penuh sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 344/KMK.05/2019 Tanggal 26 April 2019.

Untuk meningkatkan jumlah wisatawan di kawasan Borobudur dan sekitarnya, maka dibangun Yogyakarta *International Airport* (YIA) menjadi salah satu pintu masuk kunjungan wisatawan di Yogyakarta dan Jawa Tengah.

YIA merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagaimana tercantum dalam Perpres No. 56 Tahun 2018, dimana PT Angkasa Pura I (Persero) ditugaskan untuk membangun dan mengoperasikan bandara tersebut sesuai amanat Pasal 2 ayat (1) Perpres No. 98 Tahun 2017. Yogyakarta International Airport (YIA) telah beroperasi terbatas sejak 6 Mei 2019. Ditargetkan pada 29 Maret 2020 bandara ini sudah *full operation*. Selain itu juga dilakukan pembangunan gerbang masuk ke Borobudur. *Detail Engineering Design* (DED) empat Gerbang masuk sudah selesai yakni Gerbang Blondo (arah dari Semarang), Gerbang Palbapang (arah dari Yogya), Gerbang Kembang Limus (arah dari Purworejo), dan Gerbang Klamong (arah dari Kulon Progo).

Proses tender dan dilanjutkan dengan proses konstruksi dan targetnya dapat selesai pada akhir 2020. Saat ini juga tengah dilakukan penataan pedagang dan Kawasan Parkir di Lapangan Kujon, kerja sama Pemkab. Magelang, PT.TWC, dan Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

### **Dengan adanya pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas, bagaimana kelanjutan dari pengembangan tujuh KSPN lainnya yang masuk 10+2 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional?**

Arahan Presiden bahwa kita fokus terlebih dahulu pada Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas, karena infrastruktur di lima destinasi tersebut harus selesai pada akhir 2020. Setelah selesai, selanjutnya tentu saja menyusul tujuh KSPN lainnya. Semuanya kita laksanakan secara bertahap.

### **Mengingat pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas ini memerlukan dukungan lintas sektor, strategi apa yang**

*" Arahan Presiden bahwa kita fokus terlebih dahulu pada Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas, karena infrastruktur di lima destinasi tersebut harus selesai pada akhir 2020"*

## Pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas

### Borobudur



#### Dibangun Yogyakarta International Airport (YIA)

- Salah satu pintu masuk kunjungan wisatawan di Yogyakarta dan Jawa Tengah.
- Merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN).
- Telah beroperasi terbatas sejak 6 Mei 2019.
- Ditargetkan pada 29 Maret 2020 sudah full operation.



#### Pembangunan Gerbang Masuk ke Borobudur

- Detail Engineering Design (DED) empat Gerbang masuk sudah selesai :
  - Gerbang Blondo (arah dari Semarang).
  - Gerbang Palbapang (arah dari Yogya).
  - Gerbang Kembang Limus (arah dari Purworejo), dan
  - Gerbang Klangan (arah dari Kulon Progo).
- Proses konstruksi ditargetkan selesai pada akhir 2020.
- Penataan pedagang dan Kawasan Parkir di Lapangan Kujon

#### dilakukan Bapak dalam melakukan sinkronisasi dan sinergitas antar sektor tersebut dan seperti apa pula bentuk koordinasinya?

Menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi merupakan tugas Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Kemenko Kemaritiman dan Investasi mengoordinasikan tujuh Kementerian yakni Kementerian Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM), Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Badan

Koordinasi Penanaman Modal. Bentuk koordinasi yang dilakukan adalah dalam Rapat Koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon 1, dan tingkat teknis lintas Kementerian/Lembaga.

#### Dari sisi sektor infrastruktur PUPR, perencanaan dan pemrograman seperti apa yang diperlukan untuk mendukung percepatan pengembangan lima destinasi wisata itu?

Perlu dilakukan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar yang meliputi bidang prasarana umum antara lain seperti jalan, air bersih, dan kebersihan lingkungan.

#### Dalam pengembangan pariwisata dibutuhkan dukungan berbagai sektor. Menurut Bapak bagaimana kontribusi berbagai sektor (infrastruktur, ekonomi kreatif, investasi dan sektor lain) dalam mendukung pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas tersebut dan kontribusi sektor mana saja yang perlu lebih ditingkatkan lagi?

Dukungan dan sinergi berbagai sektor sangat penting. Infrastruktur yang baik, bila tidak didukung oleh sektor ekonomi kreatif yang unggul, maka pengembangan destinasi pariwisata akan kurang optimal dan kurang menarik wisatawan. Harus ada keserasian dan harmonisasi antar sektor.

Salah satunya yang dapat diterapkan dalam *framework* pemanfaatan lingkungan bagi kegiatan pengembangan pariwisata adalah Konsep **4C\*** (Owen et al., 1993). Pertama, *Compromise* atau harus ada keseimbangan antara pembangunan pariwisata dan konservasi lingkungan. Kedua, *commitment* pembangunan berkelanjutan dan pembangunan pariwisata berkelanjutan membutuhkan aksi/tindakan dan bukan hanya retorika. Ketiga, *control* yang tertuang didalam pembentukan kerangka kerja atau rencana, guna efektivitas pengaturan skala dan pola pembangunan. Dan yang keempat adalah *cooperation* yang mengenali kebutuhan





Perlu perbaikan regulasi dan kebijakan dengan adanya kesamaan visi dan misi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah



Perlu **peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata**



Filosofi "**Meja Seribu Kaki**", bekerja sama dalam mengatasi masalah



Pengembangan pariwisata perlu pemenuhan kebutuhan **infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan kebersihan lingkungan.**

**Dukungan dan sinergi berbagai sektor sangat penting** sehingga perlu keserasian dan harmonisasi antar sektor.



Langkah percepatan pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas antara lain dengan **pembentukan Badan Otorita Pariwisata (BOP).**

Kemkenko Kemaritiman dan Investasi **mengoordinasikan tujuh Kementerian.**

Bentuk koordinasi melalui **Rapat Koordinasi tingkat Menteri, tingkat Eselon 1, dan tingkat teknis lintas Kementerian/Lembaga.**



## KONKLUSI

Wawancara  
**Dr.Ir Djoko Hartoyo, M.Mar, Sc.**

Asisten Deputi Infrastruktur Pelayaran, Perikanan, dan Pariwisata, Kemkenko Maritim dan Investasi

akan kemitraan bersama, baik skala lokal maupun internasional.

**Apa harapan Bapak mengenai dukungan berbagai pihak (Pemprov, Kabupaten/Kota, swasta, Perguruan Tinggi, tokoh adat, dll) agar pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas dapat berlangsung lancar dan cepat sesuai target Pemerintah?**

Perlu perbaikan regulasi dan kebijakan dengan adanya kesamaan visi dan misi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, prioritas Pemerintah Daerah, harmonisasi peraturan perundangan, insentif, dan mekanisme perizinan yang sederhana dan mudah. Perlu peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata dalam hal penguasaan bahasa asing, keterampilan, dan sikap

melayani. Saya rasa filosofi "Meja Seribu Kaki" sangat sesuai untuk mengilustrasikan sinergitas.

"Meja Seribu Kaki" merupakan meja dengan kaki yang lebih banyak akan bisa mengatasi guncangan dan beban di setiap titik kaki lebih ringan. Filosofi ini dapat diartikan bahwa program nasional bila dilaksanakan secara bersama-sama seperti antar instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah, pihak swasta, dan masyarakat setempat, dapat berjalan dengan baik. **(Hendra)**

*"Perlu perbaikan regulasi dan kebijakan dengan adanya kesamaan visi dan misi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, prioritas Pemerintah Daerah, harmonisasi peraturan perundangan, insentif, dan mekanisme perizinan yang sederhana dan mudah"*



## **Kementerian PUPR Kawal Pembangunan Infrastruktur di Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas**

**Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc**

.....  
*Ketua Tim Pemantauan dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional (TPE-PSN) Kementerian PUPR  
Ketua Central Project Monitoring Unit-Indonesia Tourism Development Project  
(CPMU-ITDP) Kementerian PUPR*

**P**emerintah memfokuskan pada pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas yakni di Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang. Semua pemangku kepentingan dilibatkan untuk mendukung sektor pariwisata. Sebagai salah satu instansi yang mendukung sektor tersebut, Kementerian PUPR akan mengawal pembangunan infrastruktur di lima kawasan pariwisata itu, agar berjalan tepat waktu. Berikut wawancara “Buletin Sinergi” dengan Ketua Tim TPE-PSN Kementerian PUPR dan Ketua CPMU-ITDP seputar Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas tersebut.

**Pemerintah saat ini memfokuskan pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas Langkah-langkah apa yang akan dan sedang dilakukan Bapak untuk mempercepat pengembangan infrastruktur PUPR di kawasan tersebut, mengingat Presiden menginstruksikan pembangunan infrastrukturnya selesai pada akhir 2020?**

Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas itu sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RJPMN) dan instruksi Presiden terkait sektor pariwisata ini kita siap dukung dan melaksanakannya dengan baik. Tentunya kita harus memastikan bahwa desain proyek - proyek di kawasan tersebut sudah bisa diselesaikan dan ditender secepat mungkin. Tendernya kita kawal untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan selesai tepat waktu.

Dan sebagai Ketua CPMU-ITDP saya bertanggungjawab mengelola pinjaman dari World Bank untuk pengembangan tiga destinasi pariwisata yakni Danau Toba,

Borobudur, dan Mandalika. Nantinya akan ditambah dengan Labuan Bajo, Wakatobi, Bromo-Semeru-Tengger. Saya juga sebagai Ketua TPE-PSN. Proyek Strategis Nasional dasarnya dari Peraturan Presiden. Kedua tugas itu saling mengisi, karena didalam PSN terkait proyek pariwisata ada KSPN dan salah satu KSPN adalah Borobudur yang merupakan bagian dari ITMP.

**Program seperti apa yang perlu utamakan Kementerian PUPR dalam penanganan kawasan tersebut?**

Program pembangunan infrastruktur yang dibuat mendukung empat sasaran pengembangan pariwisata . Pertama, tentunya perbaikan regulasi. Sasaran kedua, infrastruktur. Sasaran ketiga, pengembangan industri lokal atau masyarakat lokal. Kemudian sasaran yang keempat adalah untuk investasi pendukung destinasi seperti kawasan dan hotel. Dari empat sasaran itu Kementerian PUPR berperan menyelesaikan sasaran nomor dua. Namun infrastruktur apapun yang kita

.....  
“Kita harus memastikan bahwa proyek - proyek di kawasan tersebut sudah bisa ditender secepat mungkin. Tendernya kita kawal untuk memastikan bahwa seluruh pekerjaan selesai tepat waktu”.

*"Kita libatkan semua pemangku kepentingan tersebut, khususnya pengusaha – pengusaha atau swasta lokal".*



bangun harus mendukung empat hal tadi.

**Apakah pembangunan infrastruktur akan tetap dilaksanakan dengan adanya wabah corona?**

Infrastruktur yang kita lakukan akan kita upayakan untuk tetap dilaksanakan sesuai target yang telah ditentukan. Namun harus dengan prinsip kehati-hatian terutama bagi para pekerja di lapangan, jangan sampai membawa virus corona, termasuk kalau ada pekerja dari luar negeri.

**Apa harapan Bapak terhadap berbagai pihak pemangku kepentingan (pemerintah pusat, DPR, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, swasta, perguruan tinggi, tokoh adat dan lainnya) dalam mendukung pengembangan lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas?**

Kita libatkan semua pemangku kepentingan tersebut, khususnya pengusaha – pengusaha atau swasta lokal. Mereka kita libatkan dalam proses formalnya seperti konsultasi publik. Kita undang mereka dan kita sampaikan apa yang kita lakukan. Kemudian mereka bisa memberi

masukan. Selain itu, keterlibatan masyarakat sangat diperlukan, karena apapun jenis infrastruktur yang kita bangun tanpa melibatkan masyarakat, maka hal itu kurang bermakna. Hal ini penting karena pembangunan infrastruktur yang kita lakukan akan kembali kepada kepentingan masyarakat juga.

**Upaya seperti apa yang telah dilakukan agar dalam pengembangan super prioritas tersebut terjadi sinergitas antar sektor dan antar pemangku kepentingan?**

Sinergi itu tentunya dimulai dari persepsi yang sama dulu, apa yang menjadi tujuan bersama. Dalam pengembangan pariwisata ini ada tiga hal yang menjadi tujuannya.

Pertama, mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan dan yang kedua membuat mereka bisa tinggal lebih lama. Kemudian yang ketiga membuat mereka belanja lebih banyak. Tiga tujuan itu harus didukung seluruh pemangku kepentingan. Kemudian yang terpenting adalah bahwa pemangku kepentingan memahami tiga tujuan itu, karena tanpa kita

sepakat dengan tujuannya, maka mereka akan jalan masing-masing. Semua pemangku kepentingan punya peran seperti Pemerintah Daerah yang punya wilayah. Mereka punya institusi yang dapat mengembangkan regulasi terkait pengembangan kawasan pariwisata. Oleh karenanya, Pemerintah Daerah harus jadi pelaku utama dalam mengembangkan pariwisata di wilayahnya dan ditambah dengan keterlibatan masyarakat setempat.

**Bagaimana Bapak melihat keterpaduan antar unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR dalam penanganan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas itu?**

Keterpaduan antar unit organisasi di lingkungan Kementerian PUPR sudah otomatis dilakukan. Hal ini dimulai dari kita mempunyai rencana induk dan kita mempunyai program-program yang mendukung kawasan pariwisata yang dikoordinir tentunya oleh BPIW.

Misalnya di kawasan pariwisata Labuan Bajo. Pekerjaan yang kita lakukan di kawasan ini meliputi pembangunan akses jalan mendukung kawasan dan transportasi. Kemudian dipadukan dengan prasarana dasar seperti penyediaan air minum

dan pengelolaan sampah dan limbah.

Untuk masalah air minum atau air bersih ini ada dua institusi yang terlibat, yakni Ditjen Sumber Daya Air dan Cipta Karya. Kemudian dikoordinasikan dalam hal penyediaan air baku dan jaringan distribusi airnya serta pembangunan jalannya. Untuk jalan ini bukan hanya untuk kendaraan saja, tapi juga untuk orang.

Sarana untuk orang diperlukan trotoar dan yang membuat disain trotoar itu adalah Ditjen Cipta Karya. Kemudian di lokasi wisata itu Ditjen Penyediaan Perumahan bisa membuat rumah khusus nelayan dan rumah yang bisa menjadi *home stay*.

Itu salah satu bentuk konkrit dalam keterpaduan pembangunan infrastruktur sektor PUPR.

Jadi khusus untuk Kementerian PUPR keterpaduan komando-nya

*Kemudian yang terpenting adalah bahwa pemangku kepentingan memahami tiga tujuan itu, karena tanpa kita sepakat dengan tujuannya, maka mereka akan jalan masing-masing.*

**KETERPADUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**

**Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri**

Perencanaan Anggaran

**BPIW**

Leader Perencanaan dan Pemrograman Kementerian PUPR

**PELAKSANA PEMBANGUNAN FISIK**

- Ditjen Bina Marga
- Ditjen Sumber Daya Air
- Ditjen Cipta Karya
- Ditjen Penyediaan Perumahan



Lima Destinasi **Pariwisata Super Prioritas** itu sudah masuk dalam **RJPMN** dan **intruksi Presiden**.



Program pembangunan infrastruktur yang dibuat mendukung **empat sasaran** pengembangan pariwisata :

1. **Perbaikan regulasi.**
2. **Infrastruktur.**
3. **Pengembangan industri lokal atau masyarakat lokal.**
4. **Untuk investasi pendukung destinasi seperti kawasan dan hotel.**



Semua pemangku kepentingan dilibatkan dalam pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas, khususnya swasta lokal.

Tiga hal yang menjadi **tujuan** pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas :

1. **Mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan.**
2. **Membuat wisatawan bisa tinggal lebih lama.**
3. **Membuat wisatawan belanja lebih banyak.**

Tiga tujuan itu harus didukung seluruh pemangku kepentingan.

ada di BPIW dan sarana dari sisi anggarannya oleh Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri. Kemudian yang merealisasikan pembangunan fisiknya adalah empat unit organisasi tersebut yakni Ditjen Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan.

**Infrastruktur yang dibangun diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Bagaimana Kementerian PUPR merealisasikan itu, terutama terkait harapan wisatawan akan kualitas infrastruktur berkelas dunia?**

Ketika wisatawan datang ke lokasi wisata ada tiga hal yang akan dilihat 3A yakni Atraksi atau sesuatu yang



Pembagian tugas unit organisasi terkait pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR :

- **Keterpaduan dikawal BPIW**
- Anggaran infrastruktur dikawal **Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri**.
- Realisasi pembangunan infrastruktur oleh empat unit organisasi yakni **Ditjen Bina Marga, Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan**.



Setelah Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas, Kementerian PUPR **akan menangani infrastruktur di destinasi pariwisata** lainnya seperti **Bromo-Tengger-Semeru dan Wakatobi**, karena sudah ada rencana induknya.

- Kunci pengelolaan** pengembangan kawasan pariwisata :
- **Koordinasi antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah**
  - **Koordinasi mulai tahap perencanaan hingga pengelolannya.**

menarik perhatian, Aksesibilitas atau kemudahan mencapai destinasi pariwisata, dan Amenitas atau berbagai fasilitas di luar akomodasi yang dapat dimanfaatkan wisatawan seperti restoran atau toko cinderamata atau biasa disebut "Tiga A".

Kementerian PUPR menyediakan infrastruktur yang memudahkan wisatawan menuju lokasi wisata dan fasilitas pendukungnya seperti air bersih dan sarana sanitasi yang berstandar internasional.

Dengan demikian wisatawan merasa nyaman tinggal di kawasan pariwisata tersebut. Selain itu diharapkan jumlah wisatawan terutama dari mancanegara semakin meningkat.

*"Ketika wisatawan datang ke lokasi wisata ada tiga hal yang akan dilihat 3A yakni Atraksi atau sesuatu yang menarik perhatian, Aksesibilitas atau kemudahan mencapai destinasi pariwisata, dan Amenitas atau berbagai fasilitas di luar akomodasi"*

## KONKLUSI

Wawancara  
**Ir. Taufik Widjoyono, M.Sc**

Ketua Tim Pemantauan dan Evaluasi Proyek Strategis Nasional (TPE-PSN) Kementerian PUPR Ketua Central Project Monitoring Unit-Indonesia Tourism Development Project (CPMU-ITDP) Kementerian PUPR.

**Selain Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas, bagaimana dengan tujuh Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas lainnya (10+2 KSPN), apakah juga masih menjadi fokus dukungan Kementerian PUPR?**

Sekarang kita fokus pada lima destinasi pariwisata. Setelah itu, kita tangani KSPN lainnya, tidak kita abaikan seperti Bromo-Tengger-Semeru dan Wakatobi. Untuk kedua destinasi pariwisata itu sudah ada rencana induknya.

Kawasan pariwisata tersebut juga ditangani Kementerian Pariwisata. Kawasan yang Karimun Jawa Kabupaten Jepara Jawa Tengah dan Tanjung Kelayang di Belitung Provinsi Bangka Belitung tetap ditangani meski di luar dari Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas.

**Apa yang perlu ditingkatkan dalam mendukung pengembangan pariwisata selain sektor infrastruktur?**

Yang jelas yang harus ditingkatkan adalah masalah kebersihan, kesehatan, dan keamanan saat turis menggunakan transportasi di lokasi wisata. Saat ini dibuat standar keamanan transportasi air, khususnya di Danau Toba.

**Apa tantangan utama dalam melaksanakan infrastruktur di kawasan pariwisata?**

Tantangan terbesar kita adalah setelah infrastruktur itu kita bangun, siapa yang bertanggung jawab mengelolanya dan bagaimana cara mengelolanya.

Hal ini penting agar infrastruktur yang dibangun itu bisa bertahan lama. Bisa saja kita percayakan kepada Pemerintah Daerah untuk mengelolanya.

Atau bisa juga dibentuk lembaga pengembangan wisata yang

dikelola daerah atau mungkin dari Kementerian Pariwisata. Ini pekerjaan rumahnya.

**Apa saran Bapak agar pengembangan kawasan pariwisata ini dapat dikelola dengan baik?**

Pengembangan kawasan pariwisata agar dapat dikelola dengan baik, kuncinya adalah koordinasi yang terus menerus antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah pada tahap perencanaan hingga pengelolaannya. Dengan koordinasi yang baik, saya berharap infrastruktur yang sudah dibangun dapat terus dikelola agar dapat bermanfaat baik masyarakat.

**(Hendra/Ajeng)**



*"Pengembangan kawasan pariwisata agar dapat dikelola dengan baik, kuncinya adalah koordinasi yang terus menerus antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah pada tahap perencanaan hingga pengelolaannya".*





# Pengembangan Pariwisata Tidak Sebatas Infrastruktur

**Dr. Yayat Supriatna, MSP**

*Dosen Teknik Planologi Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti*

Dalam konteks pengembangan destinasi pariwisata seperti di Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas, sudah didukung dengan pembangunan infrastruktur. Namun pembangunan infrastruktur perlu didukung dengan pembangunan kepariwisataan, karena seharusnya destinasi wisata itu mempunyai daya tarik yang membuat wisatawan mau berkunjung, berlama-lama tinggal di Indonesia, dan membelanjakan banyak uang. Jadi ada akselerasi ekonomi. Untuk mewujudkan hal itu perlu kontribusi sektor lain termasuk Pemerintah Daerah. Dengan demikian ada sinergi antara rencana kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk pengembangan pariwisata.

Namun yang dikhawatirkan, Pemerintah Pusat yang punya semangat tinggi dengan menggelontorkan anggaran yang besar, namun tidak semua Pemerintah Daerah yang memiliki anggaran yang cukup untuk sektor pariwisata. Namun dengan anggaran yang ada, Pemerintah Daerah harus mengupayakan atraksi yang menarik bagi wisatawan.

Misalnya membuat festival budaya. Untuk itu perlu disiapkan sumber daya manusianya agar dapat berperan dalam mengembangkan pariwisata. Mari kita belajar dari Banyuwangi. Daerah ini punya persoalan dengan angka kemiskinan. Namun Pemerintah Daerah setempat memahami akan potensi wisata yang dimiliki untuk mengikis

kemiskinan tersebut.

Kemudian, dalam mengembangkan pariwisata, salah satu masalah yang dihadapi daerah tersebut adalah masalah transportasi. Solusi yang dibuat adalah membangun infrastruktur, salah satunya dengan membangun bandara. Ketika bandara sudah terbangun, maka konsentrasi selanjutnya adalah memperbanyak maskapai yang mendaratkan pesawatnya ke kawasan tersebut. Kemudian memperbanyak festival atau kegiatan seni dan budaya setiap musim liburan.

Daya tarik pariwisata harus “dihidupkan” dengan berbagai hal, salah satunya wisata kultural. Bila Singapore mengandalkan wisata belanja dan hiburan, tapi kalau Banyuwangi mengandalkan budaya, kultural dan keindahan alam. Tentunya kondisi di Banyuwangi berbeda dengan daerah lainnya, karena setiap daerah mempunyai kekhasan masing-masing.

Misalnya Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur. Daerah ini mempunyai keunggulan berupa alam laut yang indah. Namun tidak sebatas menikmati keindahan laut dengan melakukan *diving*, misalnya, tapi seharusnya wisatawan mendapatkan daya tarik yang lain. Bila mempunyai daya tarik wisata yang banyak, dengan promosi yang gencar, maka akan banyak wisatawan yang datang, tinggal lebih lama, dan membelanjakan uangnya lebih banyak.

Selain daya tarik wisata, tentunya perlu didukung infrastruktur dan pelayanan yang baik, sehingga



wisatawan merasa nyaman untuk berwisata. Bila destinasi wisatanya itu berupa kota tua, seperti di Jakarta maupun di Semarang, maka bukan sekedar bangunan tua yang menjadi daya tarik, tapi harusnya ditambahkan informasi mengenai riwayat bangunan tersebut. Informasi yang disampaikan ide dibuat menarik, sehingga dapat menjadi daya tarik juga. Jadi seperti “bangunan berbicara”. Hal-hal seperti ini penting untuk dilakukan.

Ketika sarana infrastruktur dibangun, maka pengelolaan infrastruktur disiapkan kelembagaan yang mengelolanya. Dengan adanya lembaga seperti badan otorita, maka mendapatkan hak konsensi untuk mengelola suatu kawasan. Hal ini seperti yang ada di Danau Toba yang memiliki Badan Otorita Danau Toba.

Dengan adanya badan otorita ini wisatawan yang ke sana merasa nyaman, karena merasa di “wongke” atau diperhatikan dan dilayani dengan baik, dengan berbagai hal yang dilakukan badan otorita tersebut. Namun kelembagaan tidak hanya dalam bentuk badan otorita, tapi juga melalui komunitas wisata seperti yang ada di Bali. Komunitas ini yang mengelola tempatnya, budayanya, tradisinya, aset, dan pelayanannya.

Disamping masalah pengelolaan, yang harus diperhitungkan adalah daya dukung dan daya tampung suatu daerah atau kawasan. Hal ini persoalan yang penting. Misalnya suatu kawasan wisata masih sepi dari wisatawan, padahal daya tampungnya besar. Untuk itu perlu dirumuskan mengenai daya dukung kawasan tersebut seperti tersedianya infrastruktur yang memadai agar dapat meningkatkan kunjungan wisatawan.

Keberhasilan beberapa negara dalam mengelola pariwisatanya, dapat dicontoh Indonesia. Misalnya Jepang dan Korea yang mengutamakan wisata budaya. *Image* budaya ini sangat kuat di dua negara tersebut. Demikian pula Singapore yang memiliki wisata hiburan di Pulau Sentosa.

Negara Brasil juga bisa menjadi contoh bagi Indonesia dalam mengelola kawasan pariwisata, karena mereka bisa membuat kawasan wisata itu tidak sekedar mengandalkan alamnya dan atraksi seni dan budaya semata, tapi juga ada tempat bagi para pengrajin untuk menjual cinderamata. Jadi prinsipnya *one shop shopping*. Di Indonesia masih terpisah, terpisah karena pengelolaannya lemah. Untuk mewujudkan hal itu harus ada keterlibatan

*Dengan adanya kelembagaan seperti badan otorita, maka mendapatkan hak konsensi untuk mengelola suatu kawasan.*

berbagai sektor seperti Kementerian yang menangani Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang mengelola penjual cinderamata dan Kementerian yang menangani seni maupun budaya.

Jadi Kementerian Pariwisata itu harus menjadi “panglima” pengembangan pariwisata di lima destinasi tersebut. Kemudian Kementerian PUPR tugasnya memperbaiki dan membangun infrastruktur sektor PUPR. Bila Kementerian PUPR melaksanakan tugasnya maka harus dipastikan tidak boleh ada jalan yang berlubang ke tempat destinasi pariwisata, tidak boleh ada yang banjir, airnya harus bagus, dan pengelolaan sampahnya juga bagus. Jadi ruang lingkupnya itu infrastruktur untuk wisata.

Kementerian terkait UKM juga arahnya pada pengembangan UKM di kawasan Pariwisata. Kemudian, lembaga lain seperti Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ketika investor akan menanamkan modalnya tentunya mereka akan memperhitungkan dari segi bisnis.

Tentu yang menjadi ukuran, apakah daerah tersebut banyak dikunjungi wisatawan atau tidak. Karena investor, misalnya yang bergerak di bidang perhotelan, dia akan memperhitungkan hal itu. Diperlukan promosi yang gencar, sehingga banyak wisatawan yang datang baru kemudian investor mau menanamkan modalnya. Yang jelas, di satu kawasan itu harus ada wisata yang potensial yang kemudian didukung seluruh sektor terkait.



*Diperlukan program-program yang membuat terbangunnya karakter masyarakat yang siap menjadi tuan rumah yang baik untuk para tamu yang datang terutama dari mancanegara*

Namun yang harus diperhatikan bahwa keterlibatan masyarakat juga punya peran penting. Bila masyarakatnya menerima tamu dari luar negeri dengan ramah, apalagi ada adat istiadat atau tarian daerah yang dikemas dengan baik, maka itu juga menjadi daya tarik tersendiri.

Sederhana saja seperti ini, bila Lima Destinasi Pariwisata Prioritas itu punya sanggar-sanggar tari daerah, maka perlu dibina agar berkualitas dan dibuatkan Peraturan Daerah yang mewajibkan sanggar-sanggar tari daerah tersebut untuk tampil secara rutin di restoran atau hotel. Ini menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang dan menguntungkan pihak hotel maupun restoran. Kemampuan bahasa asing terutama bahasa Inggris, juga harus dibina kepada masyarakat. Peran perguruan tinggi bisa ikut terlibat terkait hal itu atau hal-hal lain seperti memberikan kajian atau masukan kepada pemerintah terkait pengelolaan pariwisata.

Saya menyarankan pengembangan pariwisata jangan terlalu sentralistik atau tidak terlalu mengandalkan Pemerintah Pusat. Harus ada upaya penguatan ditingkat Daerah, berupa penguatan secara pengelolaan

dan pengorganisasian di lima destinasi wisata itu. Kemudian penanaman pelembagaan nilai-nilai wisata itu, hingga ia melekat masuk terinternalisasi dalam diri penyelenggara, pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Bila pengelolaan lemah, maka pariwisata tidak mungkin bisa berkembang. Nantinya Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pelembagaan. Misalnya untuk kawasan pariwisata Danau Toba, Pemerintah sudah investasi besar. Namun ada yang penting perlu diperhatikan di kawasan tersebut adalah keramahan dan kesantunan agar wisatawan itu merasa ada di rumahnya sendiri.

Kota seperti Bandung dan Jogja, meskipun kotanya kurang tertata, namun wisatawan merasa nyaman berkunjung ke sana, karena keramahan masyarakatnya. Untuk itu diperlukan program-program yang membuat terbangunnya karakter masyarakat yang siap menjadi tuan rumah yang baik untuk para tamu yang datang terutama dari mancanegara. Hal ini perlu menjadi perhatian Pemerintah, terutama dalam mengembangkan lima destinasi pariwisata tersebut.

**KONKLUSI**

Perspektif  
**Dr. Yayat Supriatna, MSP**  
*Dosen Teknik Planologi Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti*

- Pengembangan Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas, pendekatannya masih sangat berbau pembangunan infrastruktur
- Seharusnya sebuah destinasi wisata dilihat dari sisi daya tarik yang membuat wisatawan mau berkunjung
- Ketika sarana infrastruktur dibangun, maka pengelolaan infrastruktur disiapkan kelembagaan yang mengelolanya
- Keberhasilan beberapa negara dalam mengelola pariwisatanya, dapat dicontoh Indonesia. Misalnya Jepang dan Korea yang mengutamakan wisata budaya.
- Kementerian Parawisata itu harus menjadi "panglima" pengembangan pariwisata
- Pengembangan pariwisata jangan terlalu sentralistik atau tidak terlalu mengandalkan Pemerintah Pusat
- Harus ada upaya penguatan ditingkat Daerah
- Diperlukan program-program yang membuat terbangunnya karakter masyarakat yang siap menjadi tuan rumah yang baik.

# Pengusaha Menanamkan Modalnya Tergantung Kondisi Pariwisata Setempat



**DR. Ir. H. Haryadi BS Sukamdani, MM**

*Ketua Umum PHRI*

Pembangunan infrastruktur yang dibangun pemerintah khususnya yang dibangun Kementerian PUPR sangat luar biasa. Kawasan yang dilewati pembangunan infrastruktur berkontribusi pada kenaikan wisatawan terutama domestik. Contohnya jalan tol Solo – Yogya – Malang – Cirebon. Kawasan ini berdampak pada membaiknya okupansi atau hunian hotel. Sebelum jalan tol selesai dibangun, tingkat hunian hotel di Kota Solo sempat turun.

Setelah jalan tol selesai dibangun, membuat kota tersebut menjadi ramai, karena pengunjung datang tidak hanya dari kawasan sekitarnya, tapi juga dari Jakarta. Hal ini dikarenakan waktu tempuh menjadi lebih pendek. Bahkan dari Surabaya ke Solo hanya 2,5 jam. Kontribusi seperti yang dilakukan Kementerian PUPR tersebut merupakan hal yang bagus.

Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan tingkat kunjungan ke salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas, yakni Danau Toba di Sumatera Utara. Sebab yang terjadi di sana angka intensitas penerbangan maskapai kecil, seperti Air Asia yang hanya 30 persen. Padahal itu penerbangan dari Kualalumpur-Silangit.

Kondisi seperti ini bukan salah dari infrastrukturnya, namun bisa saja disebabkan Atraksi atau sesuatu yang menarik perhatian yang kurang. Sebab wisatawan malas untuk berkunjung, bila hanya melihat keindahan Danau Toba saja. Jadi harus dicari solusi, bagaimana caranya membuat daerah itu lebih banyak atraksi, sehingga banyak orang datang.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) telah berkontribusi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan terutama mancanegara

Selain Atraksi, di destinasi pariwisata tersebut juga harus diperhatikan masalah Aksesibilitas atau kemudahan mencapai destinasi pariwisata dan Amenitas.

dengan mendorong semua pengusaha perhotelan dan restoran untuk menanamkan di lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Namun hal itu tergantung dari Atraksi yang ditampilkan di destinasi pariwisata tersebut.

Dengan banyaknya atraksi yang menarik yang disajikan, baik atraksi budaya, seni, maupun kegiatan lainnya, maka akan mendatangkan banyak wisatawan. Untuk mendatangkan wisatawan, perlu didukung dengan promosi yang terus menerus. Bila hal itu konsisten dilakukan, maka tentunya pebisnis perhotelan dan restoran akan menanamkan modalnya ke daerah tersebut.

Selain Atraksi, di destinasi pariwisata tersebut juga harus diperhatikan masalah Aksesibilitas atau kemudahan mencapai destinasi pariwisata dan Amenitas atau berbagai fasilitas di luar akomodasi yang dapat dimanfaatkan wisatawan seperti toko cinderamata. PHRI juga mendorong pemangku kepentingan untuk melengkapi tiga hal itu.

Dari lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas, kawasan Likupang punya tantangan tersendiri, karena belum banyak dikenal orang dan fasilitasnya masih minim. Daya tariknya daerah wisata tersebut hanya bahari saja, sedangkan daya tarik lain, masih kurang. Hal ini yang perlu ditingkatkan.

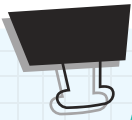
Sedangkan di Mandalika-Lombok, Pemerintah meminta pengusaha perhotelan berinvestasi di sana.

Kawasan Mandalika memang direncanakan digelar MotoGP, tetapi setelah pagelaran dunia tersebut digelar, siapa yang akan mengisi kegiatan di sana?. Respon pengusaha perhotelan agak rendah, karena mereka mempertanyakan pergerakan wisatawannya.

Jadi untuk kawasan pariwisata seperti itu, Pemerintah harus lebih banyak turun tangan dengan menggerakkan Aksesibilitas berupa peningkatan frekuensi penerbangan. Hal itu paling utama. Atraksi mutlak dilakukan, untuk menarik orang untuk datang terutama dari mancanegara. Turis asing ini datang, tentunya menggunakan pesawat. *Traffic* atau lalu lintas penerbangan dari mancanegara maupun juga dari daerah lain yang membuat pengusaha perhotelan berinvestasi.

Saat ini anggota PHRI mencapai enam ribu hotel dan untuk restoran sekitar delapan ribu restoran. Dari jumlah itu, hotel yang berbintang separuhnya dan biasanya mereka akan menanamkan modalnya sesuai dengan pangsa pasar masing-masing. PHRI tidak serta merta mengajak pengusaha menanamkan modalnya di lima destinasi pariwisata itu, karena semuanya kembali pada kondisi setempat. Sebenarnya pengusaha secara otomatis akan menanamkan modalnya, bila kondisi kawasan wisata itu banyak dikunjungi wisatawan, sehingga dapat menguntungkan dari segi bisnis.





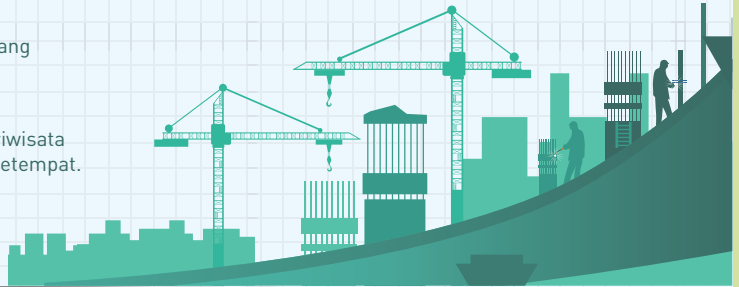
# KONKLUSI

Perspektif

**Dr. Yayat Supriatna, MSP**

Dosen Teknik Planologi Fakultas Arsitektur Lansekap dan Teknologi Lingkungan Universitas Trisakti

-  **Kontribusi Kementerian PUPR** tersebut merupakan **hal yang bagus**
-  **PHRI telah mendorong** semua pengusaha perhotelan dan restoran untuk menanamkan di lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas
-  Pemerintah harus **mengerakkan Aksesibilitas** berupa peningkatan frekuensi penerbangan
-  **Atraksi mutlak dilakukan**, untuk menarik orang untuk datang terutama dari mancanegara
-  PHRI tidak serta merta mengajak pengusaha menanamkan modalnya di lima destinasi pariwisata itu, karena semuanya kembali pada kondisi setempat.
-  **Masyarakat harus dilibatkan** secara langsung atau diberdayakan dengan menunjukkan keramahan dan terbuka menerima wisatawan
-  **Kontribusi Pemerintah Daerah penting** terutama dalam menyediakan anggaran.



Disamping perlunya atraksi atau kegiatan rutin yang menarik, masyarakat harus dilibatkan secara langsung atau diberdayakan dengan menunjukkan keramahan dan terbuka menerima wisatawan. Contohnya masyarakat di Danau Toba perlu dibina untuk masalah keramahan ini. Kondisi yang sama juga terjadi dengan masyarakat asli di Lombok. Masalah ini merupakan pekerjaan rumah kita semua, karena kesiapan masyarakat setempat sangat penting untuk membuat wisatawan nyaman berwisata.

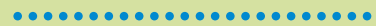
Untuk mengatasi masalah ini, perlu keterlibatan beberapa kalangan seperti perguruan tinggi dan swasta. Mereka berperan untuk memberikan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat.

Disamping kepedulian masyarakat, kontribusi Pemerintah Daerah juga menjadi penting. Salah satunya menyediakan anggaran untuk subsidi. Contohnya yang telah sukses melakukan hal itu adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mensupport maskapai Air Asia dengan memberikan subsidi, sehingga maskapai tersebut cukup

mampu melakukan promosi dan bisa menutup sebagian biaya operasionalnya. Saat *traffic*-nya sudah memenuhi skala ekonomis, maka Pemerintah Provinsi NTB sudah bisa melepas subsidi.

Wabah corona yang merebak saat ini berpengaruh pada kunjungan wisatawan mancanegara, dan kita berharap pada wisatawan domestik. Tahun 2018 wisatawan domestik mencapai 303 juta orang. Tahun 2019 turun menjadi 287 juta orang, karena tiket mahal dan tahun ini Pemerintah baru saja mengeluarkan insentif dan kita harapkan wisatawan domestik bisa meningkat.

Pengembangan pariwisata di Indonesia terutama di Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas tersebut yang paling diutamakan adalah promosi yang bukan hanya promosi *branding*, tapi *selling*. Jadi kita tidak bisa lagi membuat *branding* "Wonderful Indonesia", itu tidak jalan. Tapi kita membuat misalnya *visit* Lombok 3 malam 4 hari sekian dolar. Itu *selling* yang riil, itu yang kita perlukan. Paket wisatanya harus ditawarkan kepada wisatawan dengan gencar.



Pengembangan pariwisata di Indonesia terutama di Lima Destinasi Pariwisata Super Prioritas tersebut yang paling diutamakan adalah promosi yang bukan hanya promosi *branding*



# Faktor Pendukung Destinasi Wisata Super Prioritas Nasional

**Willem Wandik, SE**

( Kapoksi V, Fraksi Demokrat  
Anggota DPR RI Periode 2020-2024 )

Pemerintah saat ini sedang memfokuskan pengembangan pariwisata super prioritas di lima (5) lokasi wisata, yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (NTB), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), dan Likupang (Sulawesi Utara).

Oleh karena itu, selaku Kapoksi V, Fraksi Demokrat dari awal sangat setuju dengan adanya kebijakan program prioritas nasional ini untuk memfokuskan pengembangan pariwisata super prioritas di 5 lokasi wisata tersebut. Namun, yang harus perlu diingat bahwa pemerintah semestinya tetap memperhatikan kebijakan pemerintah pada periode Jokowi Pertama (2015-2019) yang sudah pernah menjadi 10 prioritas nasional destinasi wisata namun tidak masuk lagi dalam 5 lokasi wisata super prioritas, yaitu: Pulau Morotai (Maluku Utara), Tanjung Kelayang (Kepulauan Bangka Belitung), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Tanjung Lesung (Banten), Bromo (Jawa Timur).

Wisata sudah menjadi industri bidang tersendiri yang potensial untuk dikembangkan oleh

negara-negara lain di dunia khususnya yang tidak memiliki sumber daya alam melimpah. Oleh karena itu, yang perlu diupayakan untuk mewujudkan pertumbuhan pariwisata dengan baik adalah dengan adanya partisipasi aktif stakeholder.

Peran semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan dan pemerintah daerah berperan dalam rangka untuk memperbaiki lingkungan usaha yang menjadi lokasi wisata super prioritas ini guna mempengaruhi daya saing nasional dan daerah. Partisipasi aktif ini juga merupakan modal sosial dalam pembangunan ekonomi daerah dalam pembangunan industri wisata. Pemda dalam hal ini dapat berperan didalam memfasilitasi lintas pelaku pendukung industri wisata. Pemerintah daerah dapat membentuk tim lintas disiplin seperti perguruan tinggi, LSM, lembaga pengembang teknologi, ahli pemasaran, dan masyarakat lokal.

Lokasi yang menjadi destinasi wisata super prioritas ini harus menjadi sentra bagi bidang lainnya dan adanya keterkaitan dengan industri pendukung wisata sehingga menjadi suatu kluster industri wisata sendiri. Pembangunan Industri

\*tulisan ini hanya opini pribadi penulis dan bukan merupakan pernyataan resmi institusi

wisata harus menekankan pada prinsip partnership. Tidak hanya menekankan pembangunan lokasi wisata tetapi juga harus memperkuat partnership antara industri wisata yang menjadi lokasi destinasi wisata super prioritas.

Pembangunan lokasi wisata super prioritas ini, harus mendasarkan pada latar belakang budaya dan kondisi alam daerah, salah satu contohnya adalah partisipasi dan koordinatif aktif pemerintah daerah dan masyarakatnya. Contoh dalam hal ini adalah keberhasilan kabupaten Banyuwangi yang menjadi icon pariwisata baru yang cukup menonjol dibandingkan pembangunan wisata daerah lainnya.

Keberhasilan pembangunan wisata Banyuwangi ini, kita melihat karena kepemimpinan daerah menjadikannya sebagai suatu gerakan revitalisasi daerah untuk mencari atau menciptakan apa yang menjadi merk daerah, lalu meningkatkan isi dan mutunya sehingga dapat diterima dan diakui nilainya secara nasional dan internasional. Dengan menjadikan sasaran utama pembangunan perdesaan, dengan membangkitkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan skala dan ukuran perdesaan tersebut, di samping untuk mengurangi rasa ketergantungan masyarakat desa yang terlalu tinggi terhadap pemerintah daerah dan perlu menciptakan inisiatif dan semangat revitalisasi dalam masyarakat desa.

Oleh karena itu, pembangunan destinasi wisata super prioritas menanganinya harus secara mendalam, antara lain mulai dari pemetaan masalah, pembangunan infrastruktur, meperkuat jaringan akses pendanaan sehingga melakukan inovasi untuk mengembangkan produktivitas. Hanya saja, keberhasilan pembangunan destinasi wisata sangat tergantung kepada efektivitas hubungan kerja sama pemerintah pusat, daerah dan dunia usaha. Tanpa kerja sama dan komitmen yang tinggi bersama pelaku usaha swasta yang bergerak dalam pembangunan wisata di Indonesia.

Strategi untuk percepatan pengembangan kawasan pariwisata super prioritas, terutama agar berkelas dunia adalah perlu adanya dukungan kultur dan semangat berkompetisi.

Indonesia sebagai negara yang terkenal akan kekayaan sumber daya alamnya sehingga menjadi potensi bidang pariwisata dan juga berlebihan dalam sumber daya manusia (SDM). Dalam kondisi interdependensi yang tidak sejajar, kita harus merelakan tersedotnya kelebihan sumber daya kita untuk memakmurkan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Bahkan untuk laku di pasaran dunia, produk kita harus menggunakan negara lain sebagai tempat parkir untuk mendapat sertifikasi laik ekspor ke negara-negara yang memerlukannya.

Di negara-negara maju, kultur yang dikembangkan orang tua dalam mendidik anaknya sudah mengarah pada upaya memandirikannya. Sifat protektif dikembangkan sebatas pada tindakan yang menuntut keterlibatan orang tua. Anak-anak

mereka tidak pernah dilarang untuk melakukan sesuatu sepanjang bersifat konstruktif bagi perkembangan anak. Seorang anak tidak pernah dilarang untuk mengembangkan aktivitas meskipun aktivitas tersebut mengandung unsur-unsur yang dapat mencelakakan mereka.

Anak diajarkan, bagaimana menghindari bahaya apabila melakukan sesuatu kegiatan, bukan dengan menghindarkan diri dari kegiatan tersebut. Pola

hubungan orang tua dan anak dikembangkan secara demokratis sehingga anak-anak mereka tidak takut untuk bertanya ataupun membantah perintah orangtuanya apabila menurut logika masyarakat beradab bantahan tersebut sangat rasional untuk mendidik anak menjadi mandiri. Kondisi kemandirian ini pada akhirnya akhir menjadi dukungan SDM terhadap sumber daya saing nasional dan daerah, termasuk dalam pembangunan industri pariwisata.

Saat ini kondisi ekonomi global sedang berfluktuatif, apalagi dengan didukung isu Virus Corona yang hampir berdampak pada semua negara di dunia termasuk Indonesia khususnya dalam industri pariwisata. Krisis ekonomi dari sisi positif, banyak hikmah yang dapat kita ambil dari krisis ekonomi tersebut untuk lebih efektif lagi memperbaiki kehidupan berbangsa dan negara. Sangat beralasan

.....  
*Pembangunan lokasi wisata super prioritas ini, harus mendasarkan pada latar belakang budaya dan kondisi alam daerah, salah satu contohnya adalah partisipasi dan koordinatif aktif pemerintah daerah dan masyarakatnya. Contoh dalam hal ini*  
.....

*Kepercayaan terhadap rasa aman bagi negara lain terhadap suatu daerah dan negara lain ini menjadi suatu hal yang mampu untuk mengundang datang ke daerah dan negara tersebut*

bagi pemerintah untuk membangkitkan kesadaran masyarakat dalam berkompetisi sehingga di masa datang akan memberikan hormat yang tinggi terhadap daya juang daerah dan negara ini dalam mengambil manfaat dari era globalisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong terciptanya kehidupan yang demokratis di rumah tangga, sekolah-sekolah, perguruan tinggi (PT) dan birokrasi pemerintah.

Di lingkungan birokrasi pemerintah, kesadaran berkompetisi ini dilakukan dengan mengembangkan nilai-nilai profesionalisme dalam bekerja dan memberikan penghargaan kepada mereka yang mempunyai prestasi, inovasi dan kemampuan sehingga seorang pejabat tidak harus menunggu masanya untuk menduduki jabatan karier yang tinggi, dan masyarakat pun tidak kaget lagi bila melihat seorang birokrat muda menduduki jabatan dengan tingkat eselon yang tinggi.

Pemerintah harus menjadi pelopor bagi masyarakat dalam membangkitkan kesadaran akan pentingnya berkompetisi dalam pembangunan industri pariwisata nasional sehingga dapat mendatangkan wisatawan lokal dan daerah guna meningkatkan ekonomi nasional dan daerah agar menjadi daerah dan atau negara yang dihormati dalam pergaulan regional dan internasional.

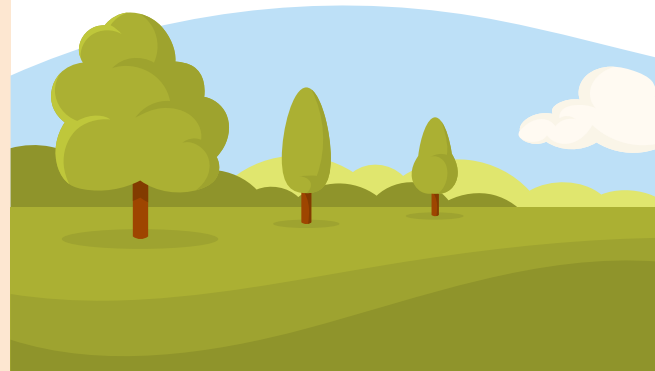
Oleh karena itu, kunci utama dari kawasan wisata untuk dapat menarik kunjungan wisatawan terutama wisatawan mancanegara yaitu faktor keamanan dan rasa nasionalisme.

Adanya kepercayaan dari semua pihak khususnya calon wisatawan mancanegara terhadap tingkat keamanan di lokasi destinasi wisata. Kepercayaan terhadap rasa aman bagi negara lain terhadap suatu daerah dan negara lain ini menjadi suatu hal yang mampu untuk mengundang datang ke

daerah dan negara tersebut. Memang hal ini diperlukan adanya jaminan juga oleh pemerintah dan pemerintah daerah setempat.

Keinginan memberdayakan masyarakat di daerah kawasan wisata jangan sampai melahirkan sifat-sifat otoritarian yang menisbikan keberadaan NKRI. Keunggulan kesukuan menjadi epidemi yang sulit dihindari. Nasionalisme tidak lagi menjadi komitmen bangsa. Primordialisme tumbuh dan berkembang untuk meningkatkan kekuatan ekonomi masyarakat lokal.

Pada saat, kita disibukkan dengan tindakan primordialisme, tanpa disadari spirit nasionalisme tampak makin rentan ketika dihadapkan kepada kekuatan kapitalisme internasional. Kekuatan ini di masa datang akan menjadi neokolonialisme



yang secara perlahan dan bertahap mampu mempengaruhi dan menjerat bangsa Indonesia kedalam alam ketergantungan yang sangat besar sehingga tidak tertutup kemungkinan mengemudikan urusan-urusan negara dan bangsa secara keseluruhan.

Dalam dunia yang sudah tanpa batas ini sebagai dari peran teknologi informasi maka, tidak ada satu bangsa pun yang dapat menghindarkan diri dari interaksi sosial, budaya maupun ekonomi. Dengan populasi terbesar kelima di dunia dan kekayaan sumber daya alam



yang melimpah, Indonesia merupakan pasar yang sangat menggiurkan bagi perusahaan-perusahaan multinasional. Mereka akan melakukan berbagai upaya untuk memanfaatkannya. Sementara kondisi ekonomi kita yang serba terbatas menuntut pemerintah daerah atau pun pusat mencari modal tambahan guna memacu pertumbuhan ekonominya dimana salah satunya dari bidang pariwisata. Dalam posisi yang demikian, pasar dipaksa untuk membuka diri sebagai kompensasi dari kebutuhan modal sehingga jelas tidak mungkin bagi kita untuk mengisolasi diri lepas dari komunitas dan permainan antar negara. Kita tentu berharap akan mendapatkan *spread effect* dan bukan *backwash effect*/

*Spread effect* akan mendorong terjadinya proses transformasi teknologi dan mobilitas modal yang aktif ke negara lain. Dengan

modal yang agresif ke luar negeri (dari wisatawan kita yang justru berkunjung ke destinasi wisata yang ada di luar negeri) karena faktor keamanan dan adanya garansi yang lebih pasti bagi mereka untuk mendapatkan keuntungan lebih besar dibandingkan mengendap di dalam negeri. Selain itu *backwash effect* juga ditunjukkan oleh akumulasi ketergantungan teknologi yang miskin lama makin besar terhadap pemilik teknologi sehingga sangat menyulitkan bagi bangsa ini untuk melepaskan diri dan membangun industri bidang pariwisata yang menjadi andalan Indonesia..

Salah satu contoh kecil untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di lokasi-lokasi destinasi wisata seperti menjual barang (asesoris) dan



demikian keterbatasan-keterbatasan yang selama ini menjadi penghalang tergalinya potensi ekonomi daerah dan atau negara dapat dieliminasi. Interaksi kedalam masyarakat internasional akan mempengaruhi pelaku ekonomi domestik untuk melakukan transformasi manajemen ke arah yang lebih efisien dan mengurang budaya yang kurang mendukung nilai-nilai kompetisi.

Jangan sampai, justru menimbulkan *backwash effect* berupa pelarian

makanan yang harus bersifat lokal. Harus ada kebijakan pemerintah agar makanan seperti KFC, Dunkin Donnat tidak beredar di area lokasi wisata.

Hal ini untuk menghindari bangsa kita kedalam posisi *peripheral* atau pinggiran, tentunya suasana egaliter yang diharapkan tampaknya harus dikubur dalam-dalam. Keadaan yang demikian harus dikikis secara bertahap agar kita berani mengatakan tidak kepada kekuatan kapitalisme internasional untuk sesuatu yang

.....  
*Spread effect akan mendorong terjadinya proses transformasi teknologi dan mobilitas modal yang aktif ke negara lain.*

Pemerintah perlu memiliki komitmen yang kuat untuk melibatkan tokoh masyarakat sebagai salah satu *stakeholders* yang ikut menentukan keberhasilan pembangunan industri pariwisata.

menurut analisis rasional akan menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada keuntungan. Ketika kita mengatakan tidak, bangsa lain yang lebih superior akan mengetahui bahwa penolakan ini memang benar-benar dinyatakan oleh bangsa yang tidak dapat diremehkan, bangsa yang dapat membedakan antara kepentingan nasionalisme dan kepentingan ekonomi.

Dalam rangka mendukung target jumlah kunjungan wisatawan, peran apa saja yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, perguruan tinggi, tokoh masyarakat sehingga tidak saling tumpang tindih dalam perannya mendukung pembangunan sektor wisata ini.

Peran pemerintah (pusat dan daerah) dan pemangku kepentingan pembangunan lainnya (PT, swasta, masyarakat) berperan dalam rangka untuk memperbaiki lingkungan usaha industri pariwisata guna mempengaruhi daya saing nasional dan daerah. Pemerintah sekarang sedang gencar dan semangat memacu mengembangkan industri pariwisata.

Persaingan dunia semakin ketat, menuntut daya saing bidang pariwisata yang semakin tinggi. Masalahnya, negara dan daerah diperhadapkan pada kompetisi dan tantangan yang sama, meski kemampuannya berbeda. Mau tidak mau, suatu negara dan daerah dituntut untuk mempunyai keunggulan kompetitif dan komperatif dibandingkan negara dan atau daerah lainnya di dunia.

Keberhasilan instrumen kebijakan industri bidang pariwisata ini tidak terlepas dari berbagai anasir kepentingan 'politik', apakah untuk jangka panjang karena pembangunan industri pariwisata yang dapat mendatangkan jumlah wisatawan baik

lokal maupun mancanegara tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan ini, perlu dengan upaya implementasi perbaikan lingkungan usaha pariwisata dengan melibatkan bagi pelaku bisnis dalam bidang wiata, yang dilakukan secara ketat dan terprogram.

Pemerintah perlu memiliki komitmen yang kuat untuk melibatkan tokoh masyarakat sebagai salah satu *stakeholders* yang ikut menentukan keberhasilan pembangunan industri pariwisata. Hal ini dikarenakan sebuah program pemerintah sulit akan berhasil apabila tidak mendapat dukungan dari rakyatnya khususnya tokoh-tokoh masyarakat, apabila pada daerah-daerah yang sangat memgang teguh tradisinya seperti di Papua, Kalimantan, Pulau Nias, Aceh dan sebagainya.

Bagaimanapun baiknya sebuah program pembangunan pariwisata akan sulit berhasil, apabila program ini jauh dari keterlibatan masyarakat khususnya tokoh masyarakat, karena tokoh masyarakat ini yang akan menjadi penggerak masyarakat untuk mendukung kelancaran pariwisata dan menjaga keamanan lokasi destinasi wisata sehingga wisatawan yang datang merasa nyaman dan mendapatkan sesuatu (oleh-oleh, pernak-pernik) yang disediakan oleh masyarakat lokal.

Pembangunan industri bidang pariwisata ini dalam jangka panjang maka dapat dipastikan meningkatkan daya saing industri pariwisata Indonesia di dunia. Dengan syarat terjadi hubungan yang saling mendukung antara industri inti, industri penunjang, dan industri terkait pembangunan wisata dikarenakan pembangunan bidang pariwisata bukan hanya lokasi yang menjadi lokasi destinasi wisata yang telah ditetapkan pemerintah tetapi juga bidang industri lainnya yang mendukung lokasi destinasi wisata tersebut.

Sehingga terjadi proses kegiatan yang saling mendukung pembangunan pariwisata nasional untuk mendorong efisiensi dan produktivitas masing-masing sektor yang mendukung pembangunan pariwisata. Bagaimana pun, industri yang mendukung pariwisata tidak berarti harus berdekatan di lokasi yang menjadi destinasi wisata yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi yang penting bagaimana industri penunjang mendukung industri inti yang tujuannya meningkatkan keunggulan kompetitif.

Pemerintah daerah dituntut untuk memoles lingkungan usaha yang menjadi lokasi destinasi wisata agar dapat mengundang jutaan wisatawan lokal dan mancanegara melalui dukungan sistem infrastruktur inovasi yang kuat dan SDM dengan talenta terbaik sehingga dunia bisnis wisata mampu menghadirkan inovasi dalam berbisnis lainnya yang mendukung wisata, termasuk pemerintah memberikan perhatian khusus untuk pengembangannya. Seluruh kemampuan, pendanaan maupun insentif akan

ditujukan pada pengembangan industri pariwisata ini demi mendatangkan wisatawan ke daerah-daerah di Indonesia.

Kita berkeyakinan bahwa apabila terjadi sinergi antar *stakeholder* (pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, pelaku usaha yang didukung masyarakat) dan antar bidang sektoral pembangunan destinasi wisata, bukan hanya destinasi wisata super prioritas nasional tetapi juga destinasi wisata nasional lainnya yang menjadi faktor penguatan daya saing dalam membangun destinasi wisata di Indonesia.

Oleh karenanya rencana dan target untuk dapat mendatangkan jutaan wisatawan lokal dan internasional bukan mustahil dapat terlaksana dengan baik dan mudah. Destinasi wisata Indonesia, tidak saja memiliki kekuatan di internal (tingkat regional dan nasional) tetapi juga dapat bersaing dengan destinasi wisata yang dimiliki daerah-daerah di negara lainnya.

Pemerintah daerah dituntut untuk memoles lingkungan usaha yang menjadi lokasi destinasi wisata agar dapat mengundang jutaan wisatawan lokal dan mancanegara







## KONKLUSI

Perspektif  
**Willem Wandik, SE**

Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi V, Fraksi Demokrat Anggota DPR RI Periode 2020-2024

### Pendukung Pengembangan KSPN :

-  **Peran Seluruh Pemangku Kepentingan**  
(Memperbaiki lingkungan usaha untuk mempengaruhi daya saing nasional dan daerah)
-  **Pembangunan wisata super prioritas**  
(Berbasis pada latar belakang budaya dan kondisi alam daerah sekitar)
-  **Percepatan pengembangan KSPN**  
(Melakukan dukungan kultur dan semangat berkompetisi)
-  **Kunci utama menarik kunjungan wisatawan**  
faktor stabilitas keamanan dan rasa nasionalisme.



“Destinasi Wisata Indonesia tidak saja memiliki kekuatan di internal (regional dan nasional), tetapi juga dapat bersaing dengan destinasi wisata yang dimiliki negara lain”



# Catatan Kritis Atas Kawasan Strategis Pariwisata Nasional



**Wahyu A. Perdana**

*Manajer Kampanye Eksekutif Nasional Walhi*

## **Pembangunan Berkelanjutan.**

Pembangunan berkelanjutan menjadi perhatian utama dalam berbagai proses perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan, tapi benarkah dalam implementasinya pembangunan berkelanjutan betul-betul dilaksanakan dalam implementasi pembangunan.

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) menjadi komitmen negara-negara sejak dipublikasikannya laporan *Our Common Future* yang disusun oleh *World Commission on Environment and Development* (WCED) pada tahun 1987. Dalam dua dokumen perencanaan di Indonesia (perencanaan pembangunan dan perencanaan tata ruang) telah mengadopsi pembangunan berkelanjutan dalam menentukan arah kebijakan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 menyebutkan bahwa pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip salah satunya adalah

berkelanjutan, dan bertujuan antara lain untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Di samping itu, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjelaskan bahwa penyelenggaraan penataan ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya perlu dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan di Indonesia sudah seharusnya mengikuti kaidah-kaidah pembangunan sesuai dengan peraturan perundangan tersebut.<sup>1</sup> Terkait lingkungan, pemanfaatan lingkungan yang berkelanjutan — sejalan dengan amanat konstitusi yang tertera pada Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak asasi atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

<sup>1</sup> *Meneropong Pembangunan Hijau Di Indonesia: Kesenjangan Dalam Perencanaan Nasional Dan Daerah, Riset Kemitraan 2019*

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan menuntut adanya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), pemerintah dan pemerintah daerah diwajibkan membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk menjamin telah dijadikannya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai dasar dalam perencanaan dan penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP).

### Catatan terhadap KSPN

KSPN sendiri bukan hal baru pada periode pemerintahan saat ini, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional atau disingkat menjadi KSPN, yang pengembangannya dimulai tahun melalui Perpres 50 /2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional tahun 2010-2025, yang menetapkan 88 lokasi sebagai KSPN. Sedangkan pada masa Presiden Jokowi, pengembangan KSPN dilanjutkan dan menetapkan 10 lokasi destinasi wisata prioritas “Bali Baru.”<sup>2</sup> tidak adanya pendekatan baru dalam kebijakan ini menunjukkan tidak ada pergeseran paradigma yang cukup signifikan dalam pembangunan. Setidaknya ada 5 catatan atas KSPN diantaranya :

**Pertama**, secara konsep penentuan kawasan “prioritas” bertentangan dengan pembangunan berkelanjutan yang menekankan pada *sustainability* lingkungan dan pemerataan ekonomi, Upaya perwujudan pembangunan berkelanjutan memerlukan pergeseran penekanan kebijakan dari yang berorientasi pada pertumbuhan (*growth*) menjadi berkelanjutan (*sustainability*) agar tantangan lingkungan dapat ditangani secara memadai (Ekins, 1993). Hal tersebut akan sulit terwujud jika konsepsinya adalah kawasan “prioritas”.

**Kedua**, pendekatan KSPN masih mengandalkan investasi, sadar ataupun tidak akan mengurangi kesempatan peran masyarakat sebagai subyek. Hal tersebut bisa dilihat pada salah satu KSPN (Likupang) yang masuk pada skema BRI (Belt Road Initiative), yang jelas disebut sebagai *tourism estate*, kondisi ini alih-alih menguntungkan masyarakat secara ekonomi, justru meminggirkannya hanya

2 Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI 2020.

Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan menuntut adanya upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh oleh semua pemangku kepentingan

sebagai pekerja pada kawasannya sendiri. Pada sisi lain banyak sekali praktek *ecotourism* berbasis komunitas yang cukup baik seperti di Pulau Pari –Kepulauan Seribu- Jakarta, Rammang-rammang – Sulawesi Selatan, dll. Contoh-contoh pengelolaan berbasis komunitas tersebut tidak hanya menguntungkan secara ekonomi untuk masyarakat secara langsung, tetapi juga lebih menjaga lingkungan.

**Ketiga**, KSPN memiliki Kecenderungan *topdown* dan mengabaikan regulasi perlindungan lingkungan lainnya, karakter pembangunan KSPN yang bersifat *top down* sangat kuat terlihat. Sehingga pada perencanaan KSPN memiliki kecenderungan penyeragaman kondisi empirik (tipologi sosial-ekonomi-ekologis, hal tersebut mengabaikan beragam bentuk pengembangan wisata berbasis masyarakat yang telah hidup (*eco-tourism bases commodity*)<sup>3</sup> .

Pada sisi lain KSPN ditetapkan terlebih dahulu tanpa adanya KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) padahal pada PP 46/2016 KLHS sendiri wajib dilaksanakan dalam penyusunan RTRW, Rencana Pembangunan, RZWP3K, rencana zonasi kawasan strategis nasional. Sulit mengklaim bahwa penetapan kawasan tidak melampaui daya dukung



3 Pembangunan KSPN: Antara Demi Pertumbuhan Ekonomi dan Praktik Green Grabbing, Sajogjo Institute, 2017

Pendekatan berbasis investasi punya kecenderungan meningkatkan konflik, dalam catatan WALHI bisa dilihat pada kasus industri pariwisata yang berkonflik dengan komunitas

dan daya tampung lingkungan hidup tanpa dilakukannya Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Jika ada yang berargumentasi bahwa penetapan KSPN dilakukan sebelum adanya PP 46/2016, maka seyogyanya hal tersebut dilakukan evaluasi ataupun *review* kebijakan yang belum melakukan KLHS dalam penetapannya, sebab dalam pasal 2 PP 46/2016 menyebutkan KLHS “*wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi...*”, sayangnya dibandingkan Pemerintah Daerah, Pemerintah pusat tertinggal jauh dalam pemenuhan kewajibannya untuk melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Di saat banyak pemma telah melakukan KLHS untuk tata ruang, rencana pembangunan ataupun zonasi pesisir dan pulau kecil, Pemerintah pusat belum menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam penyusunan KLHSnya (baik tata ruang maupun perencanaan pembangunan)

**Keempat**, Pendekatan berbasis investasi punya kecenderungan meningkatkan konflik, dalam catatan WALHI bisa dilihat pada kasus industri pariwisata yang berkonflik dengan komunitas seperti di pulau Pari-kepulauan seribu-Jakarta dan Kasus di Marosi, Sumba, NTT yang menyebabkan meninggalnya satu orang warga. Industri pariwisata pada akhirnya sering berhadapan-hadapan dalam konflik (baik laten maupun manifes) dengan komunitas, Meningkatnya konflik tersebut bisa dilihat pada laporan konflik SDA yang diterima oleh kantor staff presiden, tercatat setidaknya dari 19 kasus terkait dengan infrastruktur sepanjang 2018 saja.<sup>4</sup>

**Kelima**, Pendekatan industri dan mengandalkan investasi punya ancaman terhadap lingkungan hidup. Komunitas dan Industri memiliki pendekatan berbeda dalam

pengelolaan wilayah, termasuk pariwisata. Jika kerap kali industri melihat lingkungan sebagai komoditas, sebaliknya komunitas melihat lingkungan sebagai bagian dari kehidupannya. Kasus krisis air di Yogya dan Bali akibat industri massal pariwisata harusnya cukup menjadi pembelajaran. Pada kasus protes masyarakat terhadap penurunan status kawasan cagar alam Kamojang dan Papandayan Jabar menjadi kawasan wisata alam, menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran lebih tinggi terhadap lingkungan hidup. Secara umum kondisi lingkungan bisa dilihat pada indeks kualitas air (58,68) dan indeks kualitas tutupan lahan (56,88) Indonesia justru menunjukkan tren menurun.<sup>5</sup>

**Penutup**

Catatan diatas secara umum pada akhirnya tidak hanya melihat pada kasuistik KSPN, kecenderungan “*menuhankan*” pendekatan *growth* pada akhirnya hanya melihat konsumsi sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, tanpa meletakkan lingkungan dan masyarakat sebagai faktor utama, itu mengapa seringkali angka pertumbuhan ekonomi tidak berbanding lurus dengan gini rasio.

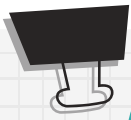
Kembali pada soal KSPN, merujuk pada riset terkait yang dilakukan oleh Sajogjo Institute, setidaknya perlu ditawarkan “*rambu-rambu*” dalam pembangunan,<sup>6</sup> diantaranya

1. Mendahulukan bentuk-bentuk kelola wisata rakyat di atas tujuan industrialiasi wisata dan mempromosikan contoh keteladanaan wisata berbasis rakyat yang sukses

<sup>5</sup> *Meneropong Pembangunan Hijau Di Indonesia: Kesenjangan Dalam Perencanaan Nasional Dan Daerah, Riset Kemitraan 2019*

<sup>6</sup> *Pembangunan KSPN: Antara Demi Pertumbuhan Ekonomi dan Praktik Green Grabbing, Sajogjo Institute,*

4. *Tinjauan Lingkungan Hidup WALHI 2019*











# KONKLUSI

Perspektif

**Wahyu A. Perdana**

Manajer Kampanye Eksekutif Walhi

Dalam pembangunan berkelanjutan untuk KSPN perlu memerhatikan 8 hal, antara lain :

-  Bentuk kelola wisata rakyat dengan **berpinsip ekologis-berkeadilan**
-  **Memperjelas aspek manusia** (hak atas ruang hidup, pengetahuan, budaya, tradisi, adat, perencanaan dalam pembangunan pariwisata.)
-  **Memperjelas sejarah dan struktur agraria** (basis masalah pembangunan pariwisata)
-  **Memperjelas status tanah dan sistem tenurial lokal** dan mencegah komodifikasi tanah
-  **Memperjelas wilayah keragaman dan biodiversity** penopang ekosistem lokal
-  **Memperjelas daya dukung dan daya tampung ekologis** (kondisi krisis sosial-ekologis empiriknya sebagai basis kebijakan wisata)
-  Memastikan **kejelasan regulasi dan kebijakan** dalam prinsip keadilan dan keberlanjutan
-  Menegaskan ulang **paradigma pembangunan** (Lebih mendahulukan dimensi keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis di atas pertumbuhan ekonomi)



berpinsip ekologis-berkeadilan.

2. Memperjelas aspek manusia (laki-laki dan perempuan) dan hak atas ruang hidup, pengetahuan, budaya, tradisi, adat dalam rencana pembangunan pariwisata.

3. Memerperjelas sejarah dan struktur agraria dan beragam ketimpangannya sebagai basis masalah pembangunan pariwisata.

4. Memperjelas status tanah dan sistem tenurial lokal dan mencegah komodifikasi tanah (dan sumber agraria) sumber hidup rakyat atas nama pembangunan pariwisata.

5. Memperjelas wilayah keragaman dan biodiversity penopang ekosistem lokal yang tidak boleh dirusak pembangunan industri pariwisata.

6. Memperjelas daya dukung dan daya tampung ekologis dan kondisi krisis sosial-ekologis empiriknya sebagai basis kebijakan wisata.

7. Memastikan kejelasan regulasi dan kebijakan dalam prinsip keadilan dan keberlanjutan.

8. Menegaskan ulang paradigma pembangunan yang lebih mendahulukan dimensi keadilan sosial dan keberlanjutan ekologis di atas pertumbuhan ekonomi.

Sebagai penutup mengutip Prof. Hariadi kartodihardjo, *pertanyaan kritis yang patut diajukan adalah "Sampai mana kebijakan KSPN dan rencana besarnya tersebut, mematuhi kewajiban dasarnya mendapatkan legitimasi dari masyarakat lokal/tempatan/adat/komunitas sebagai pemilik hak atas ruang hidup mereka? Dan pada gilirannya mampu mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan sosial-ekologis. Jika hal ini tidak terpenuhi dan dilakukan oleh pemangku Kebijakan KSPN, maka hal ini menegaskan analisa bahwa akar masalah kebijakan politik pembangunan berbasis sumberdaya alam di Indonesia adalah "legal non legitimed" (Kartodihardjo, 2016)<sup>7</sup>*

7. Pembangunan KSPN: Antara Demi Pertumbuhan Ekonomi dan Praktik Green Grabbing, Sajogjo Institute, 2017

.....  
"Sampai mana kebijakan KSPN dan rencana besarnya tersebut, mematuhi kewajiban dasarnya mendapatkan legitimasi dari masyarakat lokal/tempatan/adat/komunitas sebagai pemilik hak atas ruang hidup mereka?"

# Mengembangkan Destinasi Pariwisata



Judul Buku :  
**Aktivitas dan Kompleksitas Kepariwisataan**  
Penulis :  
**Rinsky K. Judisseno**  
Penerbit :  
**Gramedia Pustaka Utama**  
Tahun Terbit : 2017  
Jumlah Halaman: 284 halaman

## Dua Peran Pemerintah dalam Dunia Pariwisata

Pemerintah memiliki dua peran penting dalam pengembangan kawasan pariwisata, yaitu sebagai pengusaha (*entrepreneur*), dan sebagai pembuat kebijakan (*regulator*). Peran pemerintah sebagai pengusaha di bidang pariwisata ada hakikatnya adalah wajar karena hanya pemerintah yang sanggup membiayai semua pembangunan yang terkait dengan penyiapan dan pengadaan atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan promosi pariwisata. Sementara kehadiran pihak swasta hanya sebagai pelengkap. Swasta hanya mau berinvestasi ketika “wadahnya” sudah disediakan oleh pemerintah.

Hal itu pernah diungkapkan dalam sebuah artikel berjudul “*The Tourism Boom in Indonesia*”: *They are poorly served by infrastructure, far from international or even domestic air services and have few of the amenities expected by most tourists. Some are malaria prone. The private sector would be unlikely to invest in four--and*

“Pembangunan pariwisata di suatu Negara pada awalnya diinisiasi oleh pemerintah. Partisipasi pihak swasta akan bermunculan seiring adanya komitmen pemerintah terhadap suatu destinasi wisata.”



*five—star hotels in Lombok, Tana toraja, Flores or Irian Jaya, for example, unless the government was prepared to guarantee provision of infrastructure, including roads, airports, and sewerage, and to undertake malaria control measures.* (Booth, 1990 hlm. 72).

Banyak sumber lain yang dituliskan di dalam buku ini juga menyatakan bahwa pembangunan pariwisata di suatu Negara pada awalnya diinisiasi oleh pemerintah. Partisipasi pihak swasta akan bermunculan seiring adanya komitmen pemerintah terhadap suatu destinasi wisata.

Komitmen pemerintah dalam hal ini tidak hanya sekedar menyiapkan infrastruktur, tetapi juga terlibat langsung dalam bisnis pariwisata itu sendiri. Misalnya sejak tahun 1946 pemerintah Indonesia sudah membentuk Badan Pusat Hotel Negara (BPHN) dan kemudian ada tahun 1947 diubah menjadi Hotel Negara dan Turisme (HONET) melalui Perpres No. 1/H/47. Selain bidang perhotelan, keterlibatan pemerintah sebagai pengusaha bidang pariwisata juga ditunjukkan dengan pendirian Perusahaan Negara Perhubungan Udara “Garuda Indonesia Airways (GIA)” melalui PP no. 102/1961, dan Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA) melalui PP no. 61/1971.

### **Tourist Typology dan Regional Planning Process**

Seorang Sosiolog Pariwisata, Cohen (1972) mengelompokkan tipe wisatawan menjadi empat, yaitu: *Petama, The Drifter*, yaitu wisatawan yang suka bertualang dan bergaul akrab, dan ingin menyatu dengan penduduk lokal. Tipe wisatawan ini tidak mengenal medan, tapi tahu hal terbaru yang menarik untuk dikunjungi di wilayah tersebut. Penulis menyarankan, untuk tipe wisatawan ini pemerintah dapat memetakan dan menginformasikan lokasi-lokasi yang belum terjamah dan menarik untuk dikunjungi kepada petualang. Pemerintah juga harus melakukan upaya pemeliharaan dan pelestarian daerah/ situs terpencil agar tetap terjaga keasliannya.

Tipe kedua adalah *The Explorer*, yaitu wisatawan yang suka bepergian sendiri tetapi mencari moda transportasi yang nyaman. Wisatawan tipe ini sedikit mengenal medan sebagaimana mengetahui adanya objek yang menarik di suatu wilayah untuk dikunjungi. Wisatawan jenis ini sangat menginginkan moda transportasi yang aman dan

nyaman untuk ber-eksplorasi. Menurut penulis, memuaskan tipe wisatawan *Explorer* ini adalah PR besar untuk pemerintah yaitu dengan membangun infrastruktur yang memadai sambil menggandeng pihak swasta untuk berinvestasi.

Tipe ketiga adalah *Individual Mass Tourist*, yaitu tipe wisatawan yang tidak mau terikat dengan grup tertentu, namun sudah merencanakan perjalanannya dengan matang. Mereka mengenal daerah yang dikunjungi namun kurang paham objek apa yang menarik di wilayah itu. Penulis menyarankan pemerintah menambah atraksi baru yang menarik karena wisatawan model ini sudah mengenal daerah yang akan dikunjungi.

.....  
*Pengembangan kawasan wisata yang didasarkan pada tipologi wisatawan, dapat dilakukan dengan konsep Regional Planning Process for Community Based Tourism (RPP CBT) yang sudah dibahas rinci pada bab 7 buku ini.*

Tipe terakhir, adalah *Organized Mass Tourists*, yaitu tipe kelompok wisatawan yang lebih memilih paket-paket wisata yang ditawarkan oleh *travel agent*. Tipe wisatawan ini tidak terlalu suka bergaul dengan penduduk local. Mereka tahu medan, namun sangat tidak tahu objek wisata yang akan dikunjungi. Objek wisata yang dikunjungi wisatawan model ini biasanya adalah objek wisata yang terkenal, oleh karena itu penulis menyarankan agar pemerintah menjaga kualitas destinasi dan memberikan pelayanan super kepada wisatawan. Pemerintah harus mampu menjamin setiap agenda dalam *itinerary* wisatawan dapat berjalan lancar dan memuaskan.

Pengembangan kawasan wisata yang didasarkan pada tipologi wisatawan, dapat dilakukan dengan konsep *Regional Planning Process for Community Based Tourism (RPP CBT)* yang sudah dibahas rinci pada bab 7 buku ini. Konsep ini mengharuskan pemerintah melakukan *preliminary analysis* yang meliputi kegiatan penggalan dan pemetaan potensi wisata dan analisis pasar. Setelah itu baru ditentukan program stimulasi apa yang cocok untuk wilayah itu. Apakah berupa bantuan finansial/pinjaman lunak, program pelatihan, riset lapangan, atau bantuan pemasaran produk?.



Konsep RPP CBT ini mirip dengan konsep “*The Development of Tourist Friendly Destination*” yang dikemukakan oleh Anuar dkk (2012). Konsep tersebut adalah metode pengembangan kawasan pariwisata yang meliputi tiga elemen, yaitu ruang, produk, dan aktivitas.

Ruang yang ada di dalam suatu destinasi wisata harus dirujuk dengan kebutuhan dan motivasi wisatawan. Semakin otentik suatu destinasi, semakin besar minat wisatawan untuk datang. Destinasi bias dikembangkan berbasis pada kebutuhan dan tipologi wisatawan

Produk adalah satu elemen yang juga perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mengembangkan destinasi wisata. menurut Bakar (2003) di dalam buku ini, disampaikan bahwa ada tiga *levelling* produk. Level pertama adalah *Core Benefit Product*, yaitu konsep mengenai produk yang memang dibutuhkan, sesuai permintaan, dan menguntungkan bagi wisatawan. Level kedua *Actual Product* yaitu menifestasi *core product* yang dapat berupa barang maupun jasa. Sedangkan level terakhir adalah *augmented product* yang menawarkan nilai tambahan dari barang yang telah dibeli oleh wisatawan, contohnya bias berupa garansi, petunjuk pemakaian, dan lain-lain.

Elemen aktivitas, adalah elemen yang membutuhkan kreativitas dan inisiatif pemerintah. Pemerintah harus memikirkan bagaimana caranya agar aktivitas yang ditawarkan menarik dan menjadi penyempurna objek wisatanya. Elemen aktivitas ini akan berpengaruh pada kepuasan pengunjung. Ojek wisata berbasis alam dan objek wisata budaya tentu memiliki perbedaan value dan aktivitas yang dapat digali.

Jika ketiga elemen tersebut sudah dianalisa dengan baik dan menjadi dasar dalam *Regional Planning Process for Community Based Tourism*,

maka perkembangan pariwisata di sebuah destinasi diharapkan tidak perlu mengaami evolusi panjang untuk menjadi destinasi idaman. Contoh nyata dari konsep ini dapat kita lihat di Dubai yang memprioritaskan pembangunan pariwisata berbasis *individual or organize mass tourists* dengan pola pembangunan yang menghadirkan sensasi “wow” dan *modern lifestyle* tanpa evolusi panjang. Pemerintah Dubai telah mematangkan perencanaan dan riset pasar dan melibatkan stakeholder pariwisata lainnya. Begitu selesai membangun destinasinya, Dubai langsung kebanjiran wisatawan baik wisataan *individual*, maupun yang *organize mass tourists*. Tahun 20103 Dubai hanya dikunjungi 5,8 juta wisman, tahun 2013 meningkat menjadi 9,9 juta wisman, dan tahun 2015 meonjak tajam menjadi 14,2 wisman.

Beberapa ulasan di atas adalah sebagian dari kandungan buku yang berjudul *Aktivitas dan Kompleksitas Kepariwisata: Suatu Tinjauan tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata*. Buku ini mengupas konsep pariwisata, wisatawan, dan peran pemerintah dalam mengembangkan destinasi wisata yang disajikan dalam 11 bab. Penulis yang bergelar *Doctor of Philosophy* dan bekarya sebagai dosen ini, sering menulis buku terkait kebijakan publik, termasuk dalam buku ini beliau membahas kebijakan public terkait pariwisata.

.....

*Dari buku ini penulis menekankan bahwa dalam proses perencanaan pengembangan destinasi wisata, pemerintah perlu menekankan proses pra-rencana yang berupa preliminary analysis*

Dari buku ini penulis menekankan bahwa dalam proses perencanaan pengembangan destinasi wisata, pemerintah perlu menekankan proses pra-rencana yang berupa preliminary analysis sehingga jelas apa tujuan dan kebutuhan dari objek yang akan dikembangkan. Penulis juga membawa sisi pendekatan lain dalam perencanaan, yaitu melihat tipologi wisatawan.

**(Mutri Batul Aini)**



# Penyusunan Program Terpadu Melalui Konsultasi Regional

Penyusunan program pembangunan infrastruktur sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) secara terpadu antara pusat dan daerah dilakukan melalui Konsultasi Regional (Konreg). Pelaksanaan Konreg digelar di empat kota yakni Magelang, Labuan Bajo, Parapat, dan Manado, sepanjang Februari hingga awal Maret.

*Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menekankan bahwa Konreg bukan rutinitas semata, tapi merupakan penyusunan program infrastruktur yang terpadu antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*

Kementerian PUPR kembali menggelar Konreg untuk penyusunan program sektor PUPR untuk 2021. Kegiatan yang digelar setiap tahun tersebut diikuti sekitar 300 peserta yang terdiri dari Bappeda Provinsi, Dinas Bidang PUPR (Dinas Kebinamargaan Provinsi, Dinas Keciaptakaryaan Provinsi, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air / Pengairan Provinsi, dan Dinas Terkait Perumahan Provinsi), dan Balai di Lingkungan Ditjen Sumber Daya Air (Balai Besar Wilayah Sungai).

Peserta lainnya adalah dari unsur Balai dan Satker di Lingkungan Ditjen Bina Marga (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional), Satker di Lingkungan Ditjen Cipta Karya (Balai Prasarana Permukiman Wilayah), dan Satker di Lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan (Satuan Non Vertikal Tertentu atau SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi).

Kemudian ada peserta mewakili Unit Organisasi/ Ditjen Kementerian PUPR yakni Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri (PAKLN) Setjen PUPR, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan, BPIW, dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menekankan bahwa Konreg bukan rutinitas semata, tapi merupakan penyusunan program infrastruktur yang terpadu antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Ia juga memastikan bahwa Kementerian PUPR membuat program dukungan infrastruktur dengan keterpaduan antar unit organisasi seperti Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan.

Dikatakannya juga bahwa program yang dibuat Kementerian PUPR tidak berdiri sendiri. Dicontohkannya pembangunan infrastruktur jalan

menghubungkan kawasan industri. "Kita juga mempercepat revitalisasi sarana pendidikan, pasar, dan sarana olahraga sejak 2019. Nantinya di Ditjen Cipta Karya ada yang mengurus khusus terkait Sarana dan Prasarana Strategis," tutur Menteri Basuki saat membuat Konreg di Manado (2/3/2020).

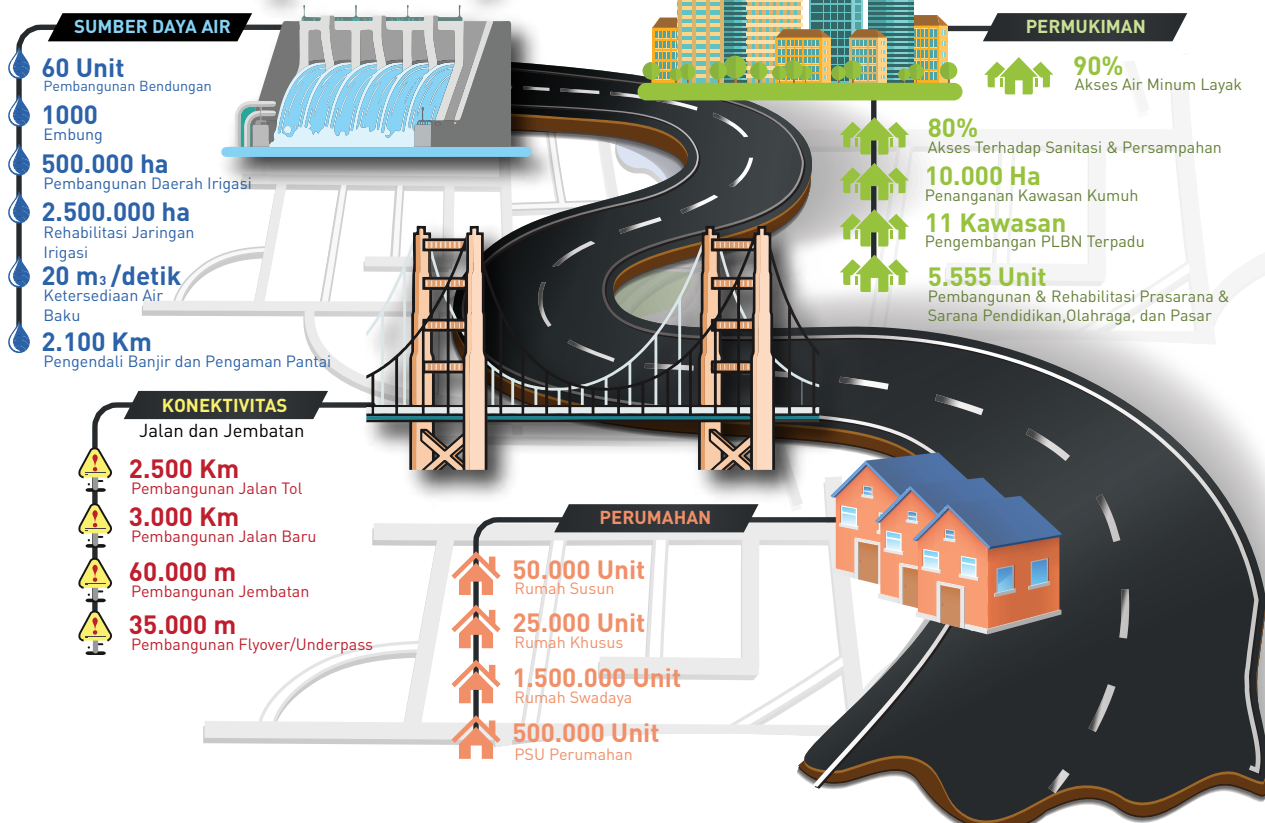
Pengembangan lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) menjadi fokus pemrograman Kementerian PUPR tahun ini. Kelima KSPN yang juga bagian dari program Destinasi Pariwisata Super Prioritas itu adalah Borobudur (Jawa Tengah), Labuan Bajo (NTT), Danau Toba (Sumatera Utara), Mandalika-Lombok (NTB), dan Likupang-Manado (Sulawesi Utara). Menurut Basuki anggaran yang ditetapkan pemerintah untuk pengembangan kelima KSPN tersebut sebesar Rp 7 triliun.

Program dukungan terhadap KSPN akan diteruskan kembali tahun depan, untuk lima KSPN lain diantaranya Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), dan Toraja (Sulawesi Selatan).

Guncangan ekonomi akibat mewabahnya penyakit corona yang berujung pada banyaknya pengangguran. Untuk membantu mengurangi angka pengangguran Kementerian PUPR akan kembali melaksanakan program padat karya pada tahun ini.

Disamping itu, masalah keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur juga menjadi sorotan Menteri Basuki. Untuk mengatasi keterbatasan anggaran tersebut, menurutnya perlu ditingkatkan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Surat Berharga Sukuk Negara (SBSN) sebagai alternatif pembiayaan.

# PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR 2020-2024



“Pengelolaan aset keuangan Pemerintah juga harus menjadi perhatian kita bersama dan pengusaha dan tenaga kerja lokal agar terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Tingkatkan penggunaan produk dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan produk-produk impor,” ucapnya.

Ada beberapa program pembangunan infrastruktur PUPR 2020-2024. Beberapa diantaranya pembangunan bendungan 60 unit, Pengendali Banjir dan Pengaman Pantai sepanjang 2.100, Pembangunan Jalan Tol sepanjang 2.500 km, Pembangunan Jembatan sepanjang 60.000 m, dan Akses Air Minum Layak 90 persen. Selain itu ada program Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana

Pendidikan, Olahraga, dan Pasar sebanyak 5.555 unit. Selanjutnya ada pembangunan 50.000 Unit Rumah Susun dan 25.000 Unit Rumah Khusus.

Konreg tahun ini digelar dengan tiga tujuan, yakni pertama menyusun program 2021 yang akurat, terpadu, dan dapat dilaksanakan sesuai *readiness criteria* dalam rangka memantapkan ketahanan pangan, sumber daya air, dan energi. Selain itu mengurangi kesenjangan antarwilayah melalui penguatan konektivitas, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pelayanan dasar, serta meningkatkan nilai tambah ekonomi melalui jasa konstruksi.

Tujuan kedua Konreg adalah sinkronisasi program Kementerian PUPR dengan disepakati dan

.....

*Konreg tahun ini digelar dengan tiga tujuan, yakni pertama menyusun program 2021 yang akurat, terpadu, dan dapat dilaksanakan sesuai readiness criteria dalam rangka memantapkan ketahanan pangan, sumber daya air, dan energi.*

didukung oleh Pemerintah Daerah (Pemda) serta Kementerian/ Lembaga terkait. Bahan penyusunan usulan Kementerian PUPR untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021.

**ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN WILAYAH RPJMN 2020-2024**

Peserta Konreg terdiri dari Bappeda Provinsi, Dinas Bidang PUPR (Dinas Kebinamargaan Provinsi, Dinas Keciaptakarya



Provinsi, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air/Pengairan Provinsi, dan Dinas Terkait Perumahan Provinsi), dan Balai di Lingkungan Ditjen Sumber Daya Air (Balai Besar Wilayah Sungai).

Peserta lainnya adalah dari unsur Balai dan Satker di Lingkungan Balai dan Satker di Lingkungan Ditjen Bina Marga (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional), Satker di Lingkungan Ditjen Cipta Karya (Balai Prasarana Permukiman Wilayah), dan Satker di Lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan (SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi). Kemudian ada peserta mewakili Unit Organisasi/ Ditjen Kementerian PUPR yakni Biro Perencanaan Anggaran dan Kerja Sama Luar Negeri (PAKLN) Setjen PUPR, Ditjen Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Penyediaan Perumahan BPIW, dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur.

**Pembahasan Infrastruktur PUPR Mulai dari Magelang Hingga Manado**

Pelaksanaan Konreg diawali di Kota Magelang, 12-14 Februari. Konreg tersebut untuk provinsi-provinsi yang ada di Pulau Jawa yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Hadi Sucahyono menjelaskan arah kebijakan pembangunan wilayah yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk wilayah Jawa antara lain memantapkan peran pulau tersebut sebagai pusat ekonomi modern dan bersaing di tingkat global dan pengembangan destinasi pariwisata berbasis alam, budaya, dan MICE (*Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition*). Perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR 2021 dilakukan berdasarkan arahan



Diskusi di Desk pada Konreg di Magelang, 13 Februari.

Sumber: BPIW

runtut dari Visi Indonesia 2045, Visium Kementerian PUPR 2030, dan Renstra PUPR 2020-2024.

“Keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi pengembangan kawasan dengan infrastruktur PUPR menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat dan Daerah. Pembangunan infrastruktur PUPR 2021 dilakukan berdasarkan perencanaan keterpaduan berbasis pengembangan wilayah dan penataan ruang,” tutur Hadi.

Dikatakannya juga bahwa pembangunan infrastruktur PUPR berkontribusi untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi (peningkatan Produk Domestik Bruto atau PDB) dan berperan dalam pengurangan kemiskinan serta peningkatan pemerataan kesejahteraan masyarakat (rasio gini dan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM).

Konreg kedua, dilaksanakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada 18-20 Februari. Di kawasan wisata yang terkenal dengan Komodonya ini, Konreg digelar untuk enam provinsi yang ada di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua yakni Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

Arah kebijakan pembangunan wilayah

RPJMN 2020 untuk Kepulauan Nusa Tenggara antara lain optimalisasi keunggulan wilayah dalam perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan, dan pariwisata.

Untuk Provinsi Maluku arah kebijakan pembangunannya seperti mendorong transformasi ekonomi melalui percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan), pengembangan industri pengolahan hasil perkebunan dan hasil nikel dan tembaga, gas, dan pengembangan pariwisata. Sedangkan untuk Provinsi Papua arah kebijakannya antara lain Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat berlandaskan pendekatan budaya berbasis ekologis dan wilayah adat.

Selanjutnya konreg ketiga digelar di Parapat, Danau Toba Sumatera Utara, pada 24 Februari hingga 26 Februari. Konreg tersebut untuk semua provinsi di Pulau Sumatera yakni Provinsi Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, Bengkulu, dan Lampung.

Arah kebijakan pembangunan wilayah dalam RPJMN 2020-2024 untuk Kepulauan Sumatera yakni pertama, transformasi ekonomi mewujudkan hilirisasi industri berbasis pertanian, perikanan, dan tambang. Kedua, optimalisasi manfaat pembangunan

.....  
*Arah kebijakan pembangunan wilayah RPJMN 2020-2024 untuk Pulau Bali salah satunya adalah pembangunan ekonomi diarahkan pada kegiatan berbasis jasa dan industri teknologi tinggi yang berkeberlanjutan.*

*Pelaksanaan Konreg, ternyata disambut positif daerah setempat. Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyatakan diselenggarakannya Konreg di Manado, berdampak pada bergairahnya aktifitas perhotelan*

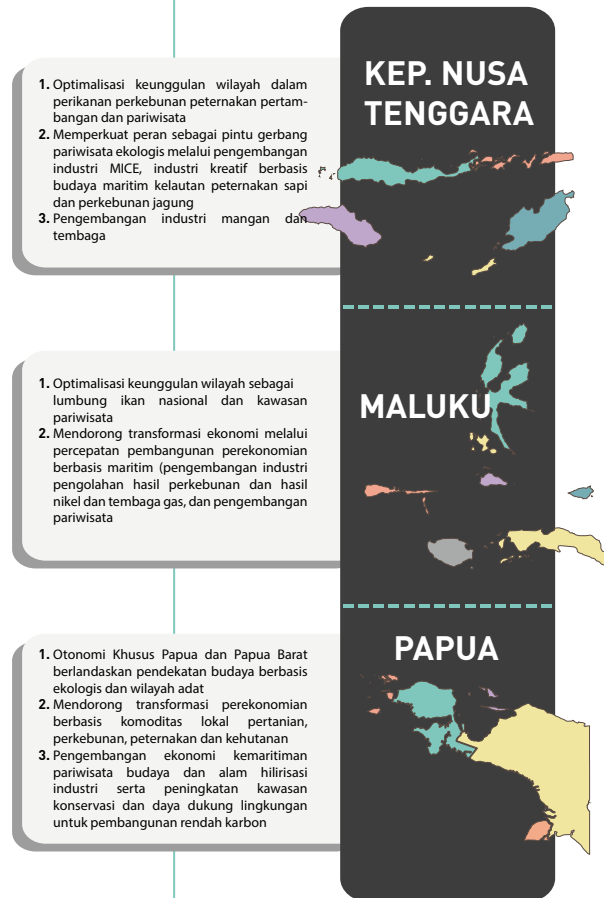
jalan tol Trans Sumatera, bandara, dan pelabuhan. Ketiga, pengembangan kawasan ekonomi di sepanjang koridor pesisir timur Sumatera. Keempat, hilirisasi komoditas unggulan dan pusat pertumbuhan yang berorientasi ekspor dengan didukung pengembangan hub internasional di Kuala Tanjung sebagai pusat perdagangan di wilayah Indonesia Bagian Barat.

Sedangkan untuk Kawasan Strategis Prioritas 2020-2024 di Sumatera, antara lain Wilayah Metropolitan Medan, Wilayah Metropolitan Palembang, Kawasan Industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KI/KEK) Arun Lhokseumawe, KI/KEK Sei Mangkei, KI/KEK Galang Batang, KI/KEK Tanjung Api-api, KI Kuala Tanjung, KI Bintang Aerospace, KI Kemingking, KI Sadai, KI Tanjung Enim, KI Tenayan, Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) Danau Toba, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Ranai, PKSN Sabang dan PKSN Bengkalis dan lain-lain.

Kota Manado menjadi konreg yang keempat. Kegiatan yang dilaksanakan pada 2-4 Maret tersebut untuk wilayah Bali, Sulawesi (Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo), dan Kalimantan (Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan). Arah kebijakan pembangunan wilayah RPJMN 2020-2024 untuk Pulau Bali salah satunya adalah pembangunan ekonomi diarahkan pada kegiatan berbasis jasa dan industri teknologi tinggi yang berkelanjutan.

Kemudian untuk wilayah Sulawesi, salah satu arah kebijakannya adalah memperkuat Sulawesi sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia dalam perdagangan internasional dan pintu gerbang Kawasan Timur Indonesia (KTI). Sedangkan salah satu arah

**ARAH KEBIJAKAN  
PEMBANGUNAN WILAYAH  
RPJMN 2020-2024**



kebijakan untuk wilayah Kalimantan yakni Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan.

Pelaksanaan Konreg, ternyata disambut positif daerah setempat. Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyatakan diselenggarakannya Konreg di Manado, berdampak pada bergairahnya aktifitas perhotelan. Hal ini berbeda dari beberapa hari sebelumnya, saat dihentikannya penerbangan langsung dari negara China akibat penyakit Corona. “Kita juga berharap dengan diselenggarakannya Konreg di Manado dapat berdampak diberikannya ‘bonus’ berupa program infrastruktur sektor PUPR untuk Provinsi Sulawesi Utara,” harapnya.



# Pengembangan Keterpaduan Infrastruktur PUPR dan *Asian Highway Network* untuk Mendukung KSPN Tanjung Kelayang dan KSPN Muaro Jambi



*Asian Highway Network dikenal pula sebagai Great Asian Highway adalah sebuah proyek kerjasama antara negara-negara di Asia, Eropa, dan badan PBB yaitu Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP), untuk memperbaiki sistem jalan raya di Asia. Kawasan di Indonesia turut dilalui peta Asian Highway, misalnya sepanjang pulau Sumatera, Jawa, dan sebagian Bali. Menindaklanjuti hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah mengupayakan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (Rute AH 25) sebagai bagian dari jaringan Asian Highway Network. Proyek ini masih terus didorong hingga saat ini.*



Pariwisata merupakan salah satu sektor yang diperkirakan akan berdampak/menangkap peluang dari pengembangan *Asian Highway*. Dari beberapa Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang berada di pesisir timur Pulau Sumatera, KSPN Muaro Jambi dan KSPN Tanjung Kelayang diperkirakan akan terkena dampak pengembangan *Asian Highway* yang cukup potensial.

Pengembangan KSPN Muaro Jambi dan KSPN Tanjung Kelayang diharapkan dapat terintegrasi dengan pengembangan Trans Sumatera, termasuk dengan infrastruktur lainnya (infrastruktur PUPR maupun infrastruktur Non-PUPR). Untuk itu, perlu dirumuskan bagaimana kebijakan, strategi, dan arahan program pengembangan infrastruktur PUPR terpadu yang efektif.

Delineasi kawasan kegiatan ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu: kawasan makro meliputi tiga provinsi yaitu Provinsi Jambi, Provinsi Sumatra Selatan dan Provinsi Bangka Belitung. Pertimbangannya adalah karena tiga provinsi tersebut dilalui oleh *Asian Highway* (AH25); membentuk klaster pengembangan wilayah bagian dari WPS 5; KSPN Palembang sebagai hub antara KSPN Muaro Jambi dan KSPN Tanjung Kelayang; dan merupakan suatu aglomerasi atraksi wisata.

Kawasan meso, meliputi DPN Palembang -Bangka Belitung (Kabupaten Belitung) dan DPN Jambi - Kerinci Seblat dks (Kabupaten Muaro Jambi). Dan Kawasan Mikro yaitu KSPN Tanjung Kelayang dan KSPN Muaro Jambi.

### Kawasan KSPN Tanjung Kelayang

KSPN Tanjung Kelayang memiliki banyak atraksi wisata, dari yang bersifat sejarah hingga panorama alam laut yang luar biasa. Di tempat ini juga terdapat beberapa destinasi yang cukup terkenal karena pernah menjadi lokasi syuting film *Laskar Pelangi*, seperti pantai, musemu kata Andrea Hirata, SD *Laskar Pelangi* dan lain-lain. Secara umum, daya tarik wisata di Kawasan Tanjung Kelayang dan sekitarnya merupakan wisata bahari serta wisata alam dengan keunggulan hamparan batuan granit dan pulau-pulau dengan pasir putih dan air yang jernih serta lansekap yang indah.

Beberapa isu yang sedang berkembang di kawasan ini antara lain:

- a. Sistem pengolahan sampah di TPA Gunung Sadai masih dilakukan secara *open dumping*.
- b. Sistem Belum adanya fasilitas tempat istirahat (*rest area*) yang dapat menampung kedatangan wisatawan dari luar kota yang melalui jalur darat dan jalur laut.
- c. Sistem Pelayanan air minum baru mencapai 30% dan masih sebatas di wilayah perkotaan. Penduduk di wilayah yang belum terlayani masih memanfaatkan air kolong dan sumur dangkal.
- d. Masih ada permukiman kumuh yang perlu ditangani dan sanitasi yang belum layak sebesar 23,1%
- e. Pembangunan Jalan Trans Belitung Sepanjang 392,96 Km

### Kebijakan Pengembangan KSPN Tanjung Kelayang

Tujuan pengembangan KSPN Tanjung Kelayang adalah : "*KSPN Tanjung Kelayang sebagai Destinasi Terintegrasi berbasis Geowisata dan Bahari Unggulan Bertaraf Internasional yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan*"

Tujuan pengembangan KSPN Tanjung Kelayang dapat dicapai melalui beberapa kebijakan sebagai berikut:

## DESAIN KAWASAN TANJUNG KELAYANG



1. Pengembangan integrasi KSPN Tanjung Kelayang dengan berbagai destinasi wisata di Bangka Belitung, melalui program prioritas :

- Pembangunan jalan lingkar Belitung sepanjang 393 Km;
- Pembangunan jembatan Desa Tanjung Tapah Ujung Kab OKI Sumatera Selatan – Desa Sebagin Pulau Bangka sepanjang 13,1 Km.
- Penguatan konektivitas koridor perkotaan Tanjung Pandan – Bandara HAS Hanandjoedin
- Peningkatan simpul transportasi Kawasan Tanjung Binga - Sijuk
- Peningkatan kapasitas transportasi Kawasan Membalong

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur melalui program prioritas :

- Pembangunan SPAM Kawasan Strategis Batu Mentas Kapasitas 50 L/d mendukung Kawasan Tanjung Pandan
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Kolong Mempadin (10-15 L/d)
- Jaringan distribusi dari SPAM Sijuk (20 L/ detik) ke lokasi KEK

d. Penataan Kawasan Tanjung Kelayang dsd.

3. Pengembangan kapasitas komunitas KSPN Tanjung Kelayang

- Internalisasi budaya lokal dalam pengembangan pariwisata
- Pelatihan tour guide bagi komunitas KSPN Tanjung Kelayang (Kelompok Penggerak Pariwisata / Kelompok Sadar Wisata)
- Pelatihan standarisasi produk dan kemasan bagi pelaku IKM, pelayanan bagi wisatawan di homestay (ruangan, perlengkapan kamar, kamar mandi dan sebagainya)

4. Pengembangan kolaborasi antar pemangku kepentingan KSPN Tanjung Kelayang

- Kesepakatan master plan Kawasan Tanjung Kelayang
- Pembinaan kompetensi teknis bagi

- pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dalam pengembangan KSPN
- c. Pengayaan kurikulum lokal dan pengenalan KSPN Tanjung Kelayang bagi siswa di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

### Kawasan KSPN Muaro Jambi

Jambi merupakan sebuah Provinsi yang berada di pesisir timur, bagian tengah Pulau Sumatera. Sama halnya dengan Provinsi lainnya yang ada di Sumatera seperti Medan, Jambi juga memiliki banyak tempat wisata yang menarik. Jambi memiliki 264 obyek wisata, yang terdiri dari tiga kategori, yaitu objek wisata buatan, objek wisata alam, dan objek wisata sejarah.

Komplek Candi Muaro Jambi yang di dalamnya tersimpan lebih dari 80 reruntuhan candi dan sisa-sisa permukiman kuno dalam rentang abad IX-XV Masehi. Kompleks percandian ini dapat ditempuh melalui darat dan sungai dengan jarak dari Kota Jambi sejauh 30 Km. Keberadaan Candi Muaro Jambi sebagai Kompleks Percandian Buddha terbesar di Asia Tenggara memiliki daya tarik sebagai tempat peribadatan umat Buddha, khususnya penganut Buddha Mahayana di mancanegara, hal ini terlihat dari ramainya turis mancanegara yang hendak beribadah pada saat perayaan waisak. Beberapa turis mancanegara tersebut berasal dari Tibet, Nepal, Bhutan, India, Vietnam, dan Tiongkok.

Beberapa isu yang sedang berkembang di kawasan ini antara lain:

- a. Minimnya atraksi pariwisata di KSPN Muaro Jambi
  - b. Jalur Asian Highway (AH25) belum berpengaruh secara signifikan terhadap kegiatan kepariwisataan KSPN Muaro Jambi.
  - c. Penanganan dan Pengelolaan sampah belum optimal
  - d. Masyarakat di KSPN Muaro Jambi masih memanfaatkan air secara langsung dari sungai Batanghari untuk keperluan sehari-hari dan terdapat potensi genangan air
  - e. Permukiman sekitar kawasan KSPN Muaro Jambi belum memiliki sistem sanitasi yang layak, sehingga masih ada kebiasaan BABS.
  - f. Belum adanya fasilitas tempat istirahat (rest area) yang dapat menampung kedatangan wisatawan dari luar kota yang melalui jalur darat
  - g. Minimnya Penginapan di lokasi Kawasan Cagar Budaya Candi Muaro Jambi
  - h. Tidak berfungsinya dermaga sungai di dekat Kawasan Candi Muaro Jambi
1. Kebijakan Pengembangan KSPN Muaro Jambi

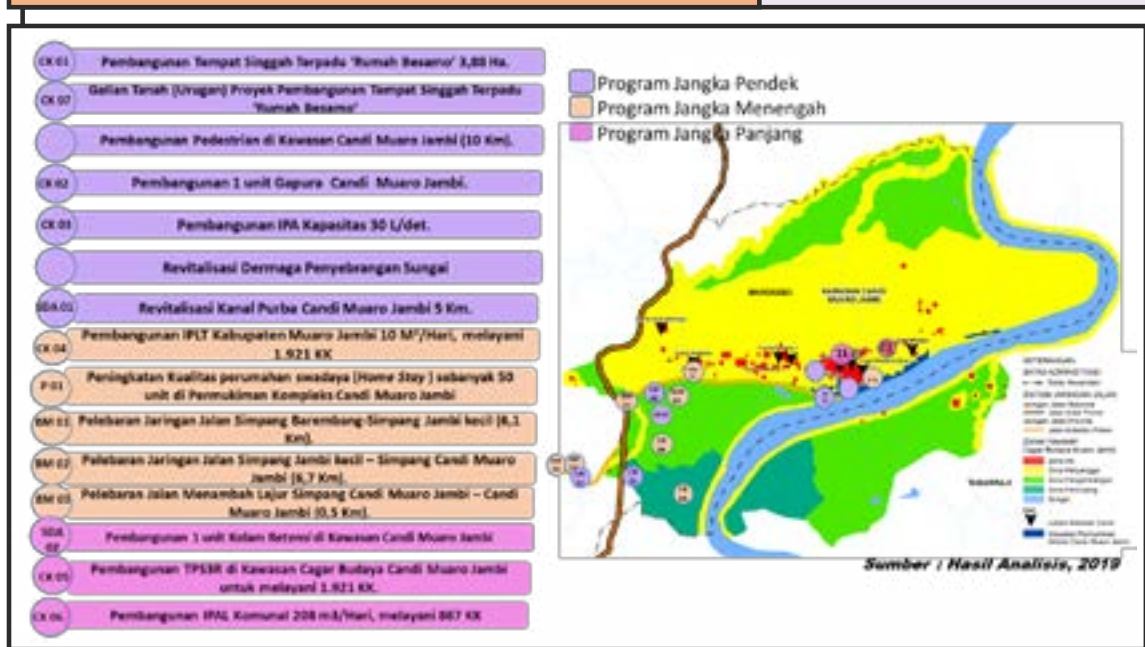
Tujuan pengembangan KSPN Muaro Jambi adalah: *"Kompleks Candi Muaro Jambi Sebagai World Heritage Site Yang dapat Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Forum Tata Kelola Destinasi Pariwisata"*

Tujuan pengembangan KSPN Muaro Jambi dapat dicapai melalui beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Pengembangan konektivitas antar KSPN Muaro Jambi dengan KSPN di 2 Destinasi Pariwisata Nasional dengan program prioritas :
  - a. Pelebaran jaringan jalan Simpang Barembang – Simpang Jambi Kecil sepanjang 6,1 Km dan Simpang Jambi Kecil – Simpang Candi Muaro Jambi sepanjang 6,7 km;
  - b. Pembebasan lahan pada jaringan jalan Simpang Barembang – Simpang Jambi Kecil sepanjang 6,1 Km dan Simpang Jambi Kecil – Simpang Candi Muaro Jambi sepanjang 6,7 km;
  - c. Pembangunan jalan penghubung ke



## PETA PENERAPAN PROGRAM KSPN MUARO JAMBI



- Pelabuhan Kuala Tanjung sepanjang 800 m;
- d. Pembangunan jembatan penghubung ke Pelabuhan Kuala Tanjung sepanjang 600 m.
2. Penataan KSPN Muaro Jambi melalui program prioritas :
- Pembangunan Tempat Singgah Terpadu 'Rumah Besamo' 3,88 Ha.
  - Galian Tanah (Urugan) Proyek Pembangunan Tempat Singgah Terpadu 'Rumah Besamo' 77,600 m<sup>3</sup>
  - Pembangunan Pedestrian di Kawasan Candi Muaro Jambi (10 Km).
  - Pembangunan 1 unit Gapura Candi Muaro Jambi.
  - Pembangunan IPA Kapasitas 10 L/det.
  - Revitalisasi Dermaga Penyebrangan Sungai dan Pembangunan Pelabuhan Jetty
  - Pembangunan IPLT Kabupaten Muaro Jambi 1.921 KK
  - Peningkatan Kualitas perumahan swadaya (Home Stay) sebanyak 50 unit di Permukiman Kompleks Candi Muaro Jambi
  - Pelebaran Jaringan Jalan Simpang Barambang-Simpang Jambi kecil (6,1 Km).
  - Pelebaran Jaringan Jalan Simpang Jambi kecil - Simpang Candi Muaro Jambi (6,7 Km).
  - Pelebaran Jalan Menambah Lajur Simpang Candi Muaro Jambi - Candi Muaro Jambi (0,5 Km).

- Normalisasi Kanal Purba Candi Muaro Jambi 60 Km.
  - Pembangunan TPS3R di Kawasan Cagar Budaya Candi Muaro Jambi untuk melayani 1.921 KK.
3. Pengembangan kapasitas komunitas KSPN Muaro Jambi melalui program prioritas :
- Pelatihan tour guide bagi komunitas Candi Muaro Jambi (Kelompok Penggerak Pariwisata / Kelompok Sadar Wisata)
  - Pelatihan standarisasi produk dan kemasan bagi pelaku IKM, pelayanan bagi wisatawan di homestay (ruangan, perlengkapan kamar, kamar mandi dan sebagainya)
  - Pelatihan tata kelola homestay bagi komunitas Candi Muaro Jambi
  - Pembangunan Balai Ekonomi Desa (Balkondes)
  - E-Ticketing QR Code informasi Kawasan Candi Muaro Jambi
4. Pengembangan kolaborasi antar pemangku kepentingan KSPN Muaro Jambi melalui prioritas :
- Kesepakatan master plan KSPN Muaro Jambi
  - Pembinaan kompetensi teknis bagi pemerintah daerah dan pemerintah provinsi dalam pengembangan KSPN
  - Pengayaan kurikulum lokal dan pengenalan KSPN Muaro Jambi bagi siswa di Provinsi Jambi

# Tahun Baru Disapa Banjir!

**M**atahari pertama yang terbit di tahun 2020 ditandai dengan kejutan pagi hari berupa banjir di beberapa wilayah di Jabodetabek, hingga Provinsi Banten. Banjir besar yang melanda tepat pada 1 Januari 2020 pagi itu memang terbilang parah. Banyak wilayah di Jakarta terendam air bahkan hingga ketinggian atap rumah. Di Lebak Provinsi Banten, sebanyak 30 jembatan penghubung antar desa dan 19 gedung sekolah rusak.

Dilansir Harian Kompas 8 Januari 2020, Kementerian PUPR mendeteksi setidaknya ada 10 sebab terjadinya banjir yang terjadi di kawasan Jabodetabek, yaitu karena drainase tersumbat (tiga titik), tanggul jebol (44 titik), Kapasitas drainase terlampaui (13 titik), Pintu air rusak (11 titik), Pompa tidak berfungsi (dua titik), sedimentasi (19 titik), penumpukan sampah (17 titik), limpasan air sungai atau saluran (62 titik), genangan di jalan tol (6 titik), dan longsor (satu titik).

Sebab-sebab itu belum termasuk adanya penambangan emas ilegal yang menyebabkan kegundulan hutan, kemudian menyebabkan banjir hebat di kawasan Lebak – Banten. Tentunya beberapa sebab banjir tidak hanya sebatas itu. Banyak faktor manusia lainnya yang turut menyebabkan musibah banjir melanda.

### Solusinya, Koordinasi yang Sinergis

Dalam Laporan Utama Koran Tempo 6 Januari 2020 lalu dituliskan bahwa Kepala Pusat Studi Bencana IPB, Yonvitner, menyarankan adanya koordinasi yang sinergis antar pemerintah pusat dan daerah. Ia menyarankan pemerintah Jawa Barat merehabilitasi daerah hulu sungai yang kritis, seperti Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum dan Gunung Salak. Pemerintah daerah juga harus memastikan tak ada lagi pembukaan lahan yang mengurangi kemampuan daratan di sekitar hulu sungai menyerap air.

Adapun bagian hilir, Pemerintah DKI Jakarta dan Banten membantu tugas perbaikan DAS yang menyempit dan mendangkal lantaran sedimentasi. Dua pihak ini juga semestinya melindungi daerah genangan, seperti rawa, situ, dan waduk. Sementara tugas pemerintah pusat adalah memperkuat anggaran dan melakukan pendidikan sadar bencana. Presiden Joko Widodo memerintahkan tiga kepala daerah untuk bersinergi mengatasi banjir. Ia

## 10 Sebab Terjadinya Banjir yang terjadi di kawasan JABODETABEK



(Sumber: Kompas 8 Januari 2020)

mengajak Pemerintah Pusat dan tiga Kepala Daerah (DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten) untuk mengevaluasi total sistem pengendalian banjir dari hulu sampai hilir. Ia juga menginginkan adanya strategi besar jangka pendek, menengah, dan panjang. Hal itu terungkap dalam rapat khusus pengendalian banjir 8 Januari lalu, seperti dikutip Kompas 10 Januari 2020.

### Pengendalian Hulu dan Hilir

Masih dari sumber yang sama, solusi dari hulu yang direncanakan pemerintah antara lain, rehabilitasi hutan dan pembangunan bendungan. Rehabilitasi hutan dilakukan dengan penanaman kembali (reboisasi) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sementara itu pembangunan bendungan dilakukan oleh Kementerian PUPR dengan mempercepat proses pembangunan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Kab. Bogor. Tempo 10 Januari 2020 menyebutkan bahwa kedua bendungan ini diprediksi akan mereduksi 30% aliran air ke Ibu Kota. Saat ini progress pengerjaan bendungan

Pemerintah DKI Jakarta dan Banten membantu tugas perbaikan DAS yang menyempit dan mendangkal lantaran sedimentasi.



*Saat ini progress pengerjaan bendungan ciawi sudah mencapai 45%, dan bendungan sukamahi 35%.*

ciawi sudah mencapai 45%, dan bendungan sukamahi 35%.

Sedangkan solusi dari hilir, mencakup beberapa program pencegahan banjir sebenarnya telah dilakukan. Misalnya Naturalisasi dan Normalisasi sungai. Menurut Dosen Fakultas Teknik UGM, Sunjoto, dalam Opiniya di Kompas 10 Januari 2020, naturalisasi dalam masalah banjir adalah meresapkan pada suatu daerah yang alami rapat vegetasi, sedikit rumah, dan bangunan lain. Namun saat ini *vegetation cover* di area Jadebotabek telah musnah karena pembangunan yang massif. Hal itu memicu tidak adanya *infiltrasi*, dan air menjadi *runoff* (aliran permukaan) yang menyebabkan banjir.

Sementara Normalisasi adalah upaya pencegahan genangan dengan cara mengalirkan kelebihan air melalui saluran *drainase*, ke sungai, kemudian ke laut. Untuk memenuhi metode ini, dibutuhkan kondisi sungai yang sesuai (kedalaman dan lebarnya). Oleh karena itu fokus normalisasi adalah menghitung luas tampang jaringan dengan parameter debit air dan kecepatan aliran.

#### **Peran BPIW Kementerian PUPR**

Jakarta secara kontur tanah memang berada pada dataran rendah dan kawasan hilir sehingga air pasti memang akan menuju Jakarta. Selain itu Jakarta juga memiliki banyak rawa yang saat ini banyak berubah menjadi permukiman. Terjadinya banjir di wilayah Jadebotabek, menurut Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Firman H Napitupulu, adalah

karena kesalahan adanya permukiman di area-area resapan. Selain itu, infrastruktur berupa kanal/ saluran air, dan sungai pun tidak memenuhi standar untuk ukuran penduduk kota besar seperti Jakarta.

Selain di Jakarta, daerah penyangga yang memiliki peran penting sebagai resapan air dan terlarang untuk dibangun, pun saat ini sudah sangat padat dan penuh dengan bangunan.

Misalnya area Depok, Bogor, bahkan area puncak telah penuh dengan villa-villa mewah yang dibangun melanggar ketentuan Tata Ruang. Firman mengatakan seharusnya ketika Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) melarang pembangunan di suatu kawasan (termasuk daerah resapan dan hutan lindung), maka harus diikuti. Peraturan yang dibuat harus ditaati dengan disiplin. Pemegang wewenang tidak boleh memberi izin pembangunan di kawasan terlarang dengan alasan apapun.

Kementerian PUPR sebagai kementerian teknis yang memiliki tugas membangun infrastruktur, saat ini telah memberikan perhatian khusus terhadap masalah kelestarian lingkungan, dan kebencanaan. "Jangan sampai pembangunan infrastruktur yang dilakukan menambah beratnya beban, dan akhirnya menimbulkan kerusakan lingkungan" Ujar Firman.

Firman melanjutkan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, dalam masalah banjir ini setidaknya m dua peran, yaitu:



## 1. BPIW mengatur pembangunan infrastruktur kawasan di seluruh Indonesia sesuai dengan karakter yang berbeda-beda

BPIW menginisiasi perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR berbasis pengembangan wilayah. Konsep ini memadukan perencanaan antarsektor untuk membangun konektivitas, aksesibilitas, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di sekitar kawasan. Prinsipnya adalah, apapun yang kita bangun diharapkan tidak selesai hanya sebatas fisik saja, tapi membawa dampak positif dan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar.

BPIW juga membuat arahan dan rencana program infrastruktur PUPR yang sesuai dengan karakter masing-masing wilayah. Misalnya wilayah Indonesia Bagian Barat tentu berbeda dengan Timur. Wilayah barat memiliki curah hujan tinggi, struktur batuan muda, sedangkan bagian timur yang secara curah hujan lebih rendah, dan struktur batumannya tua dan keras.

Informasi karakter topografi wilayah yang seperti ini disusun oleh BPIW, kemudian menjadi pedoman bagi Unit Organisasi teknis dalam melaksanakan pembangunan, termasuk memilih teknologi dan bahan baku yang sesuai. Tugas BPIW untuk membuat analisa

kebijakan seperti itu dan dituangkan dalam rencana induk (berupa Rencana Induk Pulau), kemudian diturunkan dalam Program-program Jangka Menengah (PJM).

## 2. BPIW menjadi supervisor Pemerintah Daerah untuk mengawal pembangunan infrastruktur PUPR agar tetap sesuai dengan kaidah dan aturan Tata Ruang yang berlaku

Implementasi pembangunan yang tertib hukum di tingkat daerah adalah hal yang perlu dimonitor, dan itu salah satu tugas pemerintah pusat. Seperti kita ketahui, banyak pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah karena lemahnya pengawasan. Oleh karena itu seharusnya BPIW turut andil dalam hal ini, terutama untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur PUPR di daerah, agar tetap tertib hukum dan mengutamakan kelestarian lingkungan.

\*\*\*

.....  
*Implementasi pembangunan yang tertib hukum di tingkat daerah adalah hal yang perlu dimonitor*

## PENGENDALIAN BANJIR

### Pengendalian banjir dari hulu:

1. Rehabilitasi hutan
2. Pembangunan Bendungan di kawasan Ciawi dan Sukamahi

### Pengendalian banjir dari hilir:

1. Naturalisasi sungai
2. Normalisasi sungai

(Sumber: Kompas 10 Januari 2020)



**K**ementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) melakukan perencanaan pembangunan infrastruktur PUPR terpadu dalam pengembangan suatu kawasan dan wilayah di Tanah Air. Program yang disiapkan antara lain pembangunan jalan nasional, rehabilitasi jalan, pembangunan jembatan, pembangunan sarana dan prasarana penunjang, pembangunan rumah khusus serta pemenuhan pelayanan dasar infrastruktur permukiman. Saat ini rubrik bidik lensa Buletin Sinergi memotret infrastruktur PUPR di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Utara (Sulut).

## JEMBATAN SOEKARNO

Jembatan Soekarno yang berlokasi di Kota Manado, Sulawesi Utara turut memacu percepatan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara (Sulut) dan Kota Manado khususnya. Keberadaan jembatan yang menjadi icon Kota Manado ini telah menghubungkan kawasan pusat ekonomi di sekitar dengan Kota Manado.



**Bunaken**  
Manado, Sulawesi Utara



## JALAN TOL MANADO-BITUNG

Jalan Tol Manado-Bitung akan segera dioperasikan secara resmi dalam waktu dekat. Jalan bebas hambatan yang rencana totalnya 39,9 kilometer (km), akan dioperasikan sepanjang 20 km terlebih dahulu. Peresmian jalan tol tersebut diprediksi akan mempercepat pengembangan wilayah Minahasa Utara dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Likupang.

## JALAN TRANS FLORES

Pemerintah melalui Kementerian PUPR mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo berkembang. Salah satunya mewujudkan konektivitas dengan membangun Jalan Lingkar Utara Flores dari Labuan Bajo-Kedindi sepanjang 141,29 kilometer. Pembangunan infrastruktur jalan ini sebagai upaya untuk bisa memicu pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi di sekitar Labuan Bajo.



Pulau Padar

Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur



## PUNCAK WARINGIN

Salah satu destinasi pariwisata di kawasan Labuan Bajo yang tengah disiapkan adalah Puncak Waringin. Lokasi yang berjarak sekitar 2-3 kilometer dari Bandara Komodo. Kedepan Puncak Waringin akan dikembangkan menjadi Creative Hub, galeri Usaha Kecil Menengah (UKM), mushala, toilet kelas premium, area tenun. Kemudian akan dibangun ruang terbuka publik yang dilengkapi dengan amphitheater. Pembangunan Puncak Waringin diharapkan dapat memacu pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan sekitar Labuan Bajo.

## BPIW Matangkan Rencana Aksi NUDP 2020

BPIW Kementerian PUPR terus mematangkan rencana pelaksanaan dari *National Urban Development Project* (NUDP). NUDP sendiri merupakan program kerja sama Pemerintah RI dengan Bank Dunia. Hal itu terungkap dalam Rapat Pembahasan Paket Kegiatan NUDP di Kantor BPIW, Jakarta, Senin, 6 Januari 2020.

Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, BPIW Kementerian PUPR, M Rudy Siahaan saat membuka rapat mewakili Kepala BPIW, Hadi Sucahyono mengatakan, pada fase 2020 ini sudah ada enam kota peserta penerima NUDP, yaitu Kota Semarang, Balikpapan, Banjarmasin, Surakarta, Denpasar dan Metropolitan Bandung. "Fase 2020 ada agenda penyusunan analisa strategis sebagai masukan untuk dokumen rencana kota," ungkap Rudy. Menurutnya, NUDP sendiri ada enam tahapan.



Januari

BPIW Kementerian PUPR telah menyiapkan rencana aksi tahun 2020 hingga 2024 sebagai upaya dalam mengembangkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur-Yogyakarta-Prambanan.

Hal itu diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat membuka rapat koordinasi Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Borobudur-Yogyakarta-Prambanan di Kantor BPIW, Senin, 17 Februari 2020.

Hadi mengatakan, rapat koordinasi tersebut diharapkan dapat mematangkan rencana aksi lintas sektor dalam upaya mempercepat mengembangkan KSPN Borobudur.

Ia mengakui, pada rencana aksi 2020 hingga 2024 ada sejumlah kegiatan yang sangat strategis, yakni menghidupkan kembali *outstanding universal value* (OUV) atau nilai universal luar biasa Borobudur-Yogyakarta-Prambanan. Selain itu penanganan konektivitas dan penataan kawasan empat pintu masuk utama.



## Kembangkan KSPN Borobudur, BPIW Siapkan Rencana Aksi 2020-2024

**Februari**

Kementerian PUPR mengusulkan segala perundang-undangan yang menaungi sektor infrastruktur PUPR masuk dalam pertimbangan Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Penetapan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Calon Ibukota Negara (IKN).

Usulan itu diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat menyampaikan sejumlah masukan saat rapat finalisasi Raperpres tentang Penetapan KSN Calon IKN yang diselenggarakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) di Jakarta, Kamis, 30 Januari 2020.

“Seperti Undang-undang Jalan, Undang-undang Rumah Susun dan lainnya,” terang Hadi.

## UU Terkait PUPR Diusulkan Masuk Pertimbangan Raperpres

Guna menciptakan kesiapan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran (TA) 2020, BPIW Kementerian PUPR menggelar Rapat Koordinasi Penajaman Program dan Kegiatan di Kantor BPIW, Jakarta, Kamis, 9 Januari 2020.

Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, pembahasan penajaman pelaksanaan program dan kegiatan 2020 perlu dilakukan untuk mendapat kesamaan persepsi dalam menjalankan tugas-tugas yang diemban BPIW pada tahun ini, serta terciptanya pola kerja yang efektif dan efisien.

“Misalnya dalam upaya pengembangan KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, -red). Pada tahun 2020 ini sesuai arahan Presiden, BPIW akan memfokuskan penanganan terhadap lima KSPN super prioritas, seperti KSPN Danau Toba, Borobudur, Lombok, Labuan Bajo dan Likupang,” terang Hadi saat membuka Rapat Penajaman Program dan Kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2020.



## Program 2020 Terus Ditajamkan



## BPIW Siapkan Program Pengembangan KSPN Labuan Bajo

BPIW Kementerian PUPR menyiapkan program untuk membangun Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono mengatakan, dalam upaya pengembangan KSPN Labuan Bajo BPIW telah menyusun sejumlah rencana pengembangan infrastruktur yang akan dibangun Kementerian PUPR.

"Mulai dari penataan Kawasan Puncak Waringin, penataan Pulau Rinca, penataan Kawasan Goa Cermin, serta penataan di sepanjang Pantai Marina," ungkap Hadi saat mengikuti kunjungan Presiden Joko Widodo ke Kawasan Puncak Waringin, Labuan Bajo, NTT, Senin 20 Januari 2020.

Menurut Hadi, pada 2020 pemerintah telah menetapkan lima KSPN superprioritas.



Februari

BPIW Kementerian PUPR siap menggelar Konsultasi Regional (Konreg) 2020. Konreg tahun ini dilaksanakan untuk menyusun program Kementerian PUPR tahun 2021. Hal itu diungkapkan Kepala BPIW Kementerian PUPR, Hadi Sucahyono saat membuka rapat Pembahasan Pelaksanaan Konreg di Kantor BPIW, Jakarta, Jumat, 10 Januari 2020.

Rapat tersebut dihadiri seluruh perwakilan unit organisasi (Unor) teknis di lingkungan Kementerian PUPR, yakni yakni Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA), Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Penyediaan Perumahan.

Hadi mengharapkan, Konreg 2020 akan melahirkan program 2021 yang akurat, terpadu dan dapat dilaksanakan sesuai *readiness criteria* guna memantapkan ketahanan pangan, serta sumber daya air.

## BPIW Siap Selenggarakan Konreg 2020



## SURAT PEMBACA

### Surat Pembaca\_1



#### Perencanaan Infrastruktur Harus Mendukung Usaha Kecil dan Menengah

Kementerian PUPR dalam membangun infrastruktur berbasis pengembangan wilayah. Dalam membangun infrastruktur berbasis kawasan tersebut, harapannya dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat menengah ke bawah, jangan hanya kepentingan kalangan atas. Misalnya dalam membangun infrastruktur, harus juga dibuat skema atau perencanaan yang mendukung usaha kecil dan menengah. Contohnya pada kawasan yang akan dibangun jalan tol.

Sebab, saat proses pembangunan jalan tol berakibat pada pedagang yang ada di lokasi dibangunnya jalan tol itu seperti pedagang asongan, kehilangan tempat untuk usaha. Dan ketika tol selesai dibangun, mereka juga tidak dapat masuk untuk berjualan di rest area, karena harga sewa tempat yang mahal. Akibatnya pengusaha kelas menengah keatas saja yang bisa masuk.

**Elmi Diah L**  
Jalan Kalibata Timur  
Jakarta Selatan

### Surat Pembaca\_2



#### Semoga Ada Solusi Kemacetan di Bandung

Kota Bandung saat ini menjadi salah satu kota tujuan wisata. Hal tersebut telah menyebabkan jalan, baik jalan nasional maupun jalan kota kerap dicengkram kemacetan panjang. Sebagai warga yang di wilayah Kota Kembang, saya berharap ada terobosan dan rencana pembangunan untuk mengurai kemacetan, baik pemerintah pusat (Kementerian PUPR: BPIW-Bina Marga), pemerintah provinsi dan pemerintah kota, terutama untuk Jalan M. Toha-Jalan Soekarno dan Jalan Soekarno Hatta-Jalan Buah Batu.

Menurut saya tingkat kemacetan sudah kategori parah. Saya berharap adanya solusi kemacetan di jalan yang ada di Kota Bandung ini, membuat warga nyaman dan wisatawan pun semakin tertarik mengunjungi Kota Bandung sehingga pendapatan kota tumbuh dan warga yang tinggal di sekitar Bandung makin cinta pada kotanya.

**Ega Kartikasari**  
Ibu Rumah Tangga - Bandung

Jelajah Alam Menuju

# *Pulau Labuan Bajo*



*Pulau Padar Labuan Bajo*

Sumber: Istimewa



Sejak ditetapkan menjadi 5 kawasan super prioritas, Labuan Bajo makin menarik perhatian bagi para wisatawan. Terlebih, pemerintah pusat yakni Kementerian PUPR telah menyediakan anggaran sekitar Rp 979 miliar untuk pengembangan lanjutan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo pada beberapa sektor, seperti pembukaan akses jalan hingga pembangunan infrastruktur permukiman. Kini, Labuan Bajo merupakan salah satu destinasi wisata favorit di Indonesia yang keindahan objek wisatanya sangat terkenal hingga manca negara. Berbagai destinasi menarik dapat dikunjungi diantaranya Pulau Padar, Pulau Komodo, Pantai Pink, Pulau Rinca, dan Pulau Kanawa. Bagi anda yang tertarik untuk menikmati keindahan pulau di Labuan Bajo, berikut panduan biaya untuk transportasi, akomodasi, paket destinasi dan juga info kuliner di Labuan Bajo:

### TRANSPORTASI



Menggunakan Pesawat  
**Jakarta-Labuan Bajo**



**2,5 Jam**  
(Direct)

- Untuk **direct** terdapat maskapai Batik air dan Garuda
- Untuk **transit** terdapat banyak sekali penerbangan dari Jakarta, Denpasar, maupun Surabaya.

#### Sewa Kendaraan



### AKOMODASI



Hotel



**Rp 200k-5,000k**  
per-malam

- ★★★★★ Ayana Resort Labuan Bajo
- ★★★★ Hotel Bintang Flores
- ★★★ L Bajo Hotel
- ★★★ La Prima Hotel

Untuk keempat hotel ini **lokasinya strategis** dan tidak begitu jauh dari pelabuhan dan tempat kuliner. Kita dapat menempuhnya kurang lebih **10 hingga 20 menit** saja. Untuk jarak yang ditempuh ke atau dari Bandara pun tidak terlalu jauh untuk menuju ke 4 hotel tersebut.

### OLEH-OLEH



Oleh-oleh ketika berwisata ke Labuan Bajo, bisa kunjungi toko oleh-oleh exotic komodo souvenir shop yang letaknya dekat dengan bandara. Disini terdapat berbagai oleh-oleh khas Labuan Bajo seperti souvenir, hingga makanan dan kopi, selain itu, bisa juga ke tempat pelelangan ikan (TPI) Labuan Bajo untuk membeli ikan.

### DESTINASI



Berikut destinasi yang sering dikunjungi :



**Pulau Rinca**

- Pelabuhan - Pulau Rinca **40 menit** (menggunakan speed boat)
- Pulau Rinca kita bisa melihat berbagai binatang diantaranya Komodo, babi liar, kerbau dan burung



**Pulau Komodo**

- Pulau Rinca - Pulau Komodo **30 menit**
- Disini bisa melihat **habitat Komodo liar** dan dapat menikmati keindahan alam **Bukit Ara**



**Pulau Padar**

- Pulau Komodo - Pulau Padar **40 menit**
- Pulau Padar menjadi **tujuan utama** para wisatawan. Terdapat **permandangan pantai pasir putih** yang terhampar menggilingi pulau ini. Pemandangan istana bawah lautnya dan hamparan bukit yang menulang tinggi.



**Pulau Pink**

- Pulau Padar - Pulau Pink **30 menit**
- Pantai Pink memiliki **pasir berwarna merah muda** yang indah. Para wisatawan bisa melakukan **snorkeling** dan juga **berenang**



**Gili Lawa Darat**



**Pulau Kanawa**

### PAKET DESTINASI



**Paket Sailing Komodo**  
bermalam

**Rp 2,300k-3,500k**  
per-pax



**Paket Fullday Sailing Komodo Tour**

**Rp 600k-1,300k**  
per-pax

### KULINER



**Seafood Kampung Ujung.** Tempat makan ini mirip dengan pasar ikan, dimana terdapat tenda-tenda yang menjajakan beragam jenis kuliner seperti ikan bakar, cumi bakar, kerang rebus, capcay, cah kangkong, dan masih banyak lagi.



Terdapat berbagai macam **kedai kopi** yang sayang untuk dilewatkan.

### TIPS MENUJU LABUAN BAJO



- Cara Berwisata
- Waktu Berwisata
- Menyiapkan tiket perjalanan
- Tempat Penginapan
- Transportasi
- Tempat yang akan dikunjungi
- Susunan Jadwal Wisata
- Budget
- Barang yang dibawa
- Obat
- Persiapan Fisik yang tangguh



# — PUTUS

# PENYEBARAN COVID-19



**1**  
Bekerja dari Rumah  
(Work From Home)



**2**  
Belajar dari Rumah  
(Study From Home)



**3**  
Ibadah dari Rumah  
(Worship From Home)



**4**  
Tingkatkan Imunitas  
Tubuh



**5**  
Rajin Cuci Tangan



**6**  
Hindari Menyentuh  
Bagian Wajah secara  
Langsung



**7**  
Memakai Masker



**8**  
Hindari Interaksi  
Langsung



**9**  
Disiplin Menjaga Jarak  
(Physical Distancing)

